

TESIS

**ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP MODA TRANSPORTASI SPEED
DAN KLOTOK PENAJAM – BALIKPAPAN**



ANDI BACHTIAR LATIEF

2230232001

**PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN
FAKULTAS PASCASARJANA
UNIVERSITAS FAJAR
2024**

TESIS

ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP MODA TRANSPORTASI SPEED DAN KLOTOK PENAJAM-BALIKPAPAN

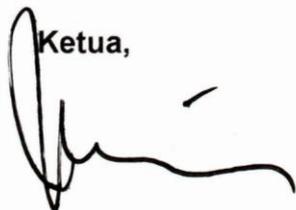
Disusun dan diajukan oleh

ANDI BACHTIAR LATIEF
2230232001

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
Pada tanggal **27 Maret 2024** dan
Dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

MENYETUJUI
TIM PEMBIMBING,

Ketua,



Dr. Mulyadi Hamid, SE., M.Si

Anggota,



Dr. Sri Adrianti Muin, SE., M.Si

Program Magister Manajemen.

Ketua program Studi,



Dr. Nurmadhani Fitri Suyuthi, SE., M.Si

UNP
FAKULTAS PASCASARJANA
PRODI MAGISTER MANAJEMEN STRATEGIS

Dekan Fakultas Pascasarjana,



Dr. Ir. Mujahid, SE., MM

TESIS

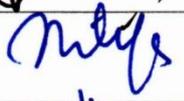
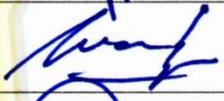
ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP MODA TRANSPORTASI SPEED DAN KLOTOK PENAJAM-BALIKPAPAN

Disusun dan diajukan oleh

ANDI BACHTIAR LATIEF
2230232001

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
Pada tanggal **27 Maret 2024** dan
Dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui
Dewan Penguji,

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Mulyadi Hamid, SE., M.Si	Ketua	
2	Dr. Sri Adrianti Muin, SE., M.Si	Sekretaris	
3	Dr. Hasniaty, SE., M.Si	Anggota	
4	Dr. Wahyu, SE., M.Si	Anggota	
5	Dr. Abdul Samad A, SE, M.Si	Anggota	

Ketua Program Studi
Magister Manajemen
Fakultas Pascasarjana
Universitas Fajar




Dr. Nurmadhani Fitri Suyuthi, SE., M.Si

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Andi Bachtiar Latief
Nomor Induk Mahasiswa : 2230232001
Program Studi : Magister Manajemen

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis berjudul **“Analisis Kebijakan Publik Terhadap Moda Transportasi Speed dan Klotok Penajam-Balikpapan”** benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan, atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis/disertasi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 27 Maret 2024
Yang menyatakan,



Andi Baentiar Latief

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan proposal penelitian sebagai salah satu tahap dalam perjalanan akademis Program Magister Manajemen di Fakultas Pascasarjana Universitas Fajar.

Penelitian ini berjudul "ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP MODA TRANSPORTASI SPEED DAN KLOTOK PENAJAM – BALIKPAPAN", dan merupakan hasil dedikasi, perjuangan, serta dukungan dari berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua yang telah berperan dalam kelancaran penyusunan proposal penelitian ini.

Terima kasih kami sampaikan kepada Rektor Universitas Fajar beserta jajaran pimpinan Fakultas Pascasarjana yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengembangkan diri melalui program Magister Manajemen. Dan kepada tim pembimbing, tim penguji yang telah Kami juga berterima kasih kepada para dosen dan tenaga pendidik yang telah memberikan ilmu, bimbingan, dan inspirasi sehingga penulis dapat Menyusun tesis hasil penelitian ini.

Ucapan terima kasih tak terhingga kami sampaikan kepada keluarga tercinta (orang tua, istri, anak, saudara-saudara) dan semua keluarga yang senantiasa memberikan doa, semangat, serta dukungan moril dan materil dalam setiap langkah perjalanan akademis kami. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan di Program Magister Manajemen yang telah menjadi sumber inspirasi dan motivasi.

Selanjutnya, penghargaan setinggi-tingginya kami tujukan kepada pihak-pihak terkait di Penajam – Balikpapan yang telah memberikan izin dan kerjasama dalam pengumpulan data serta informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.

Dengan kerendahan hati, kami menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran, kritik, dan masukan dari berbagai pihak sangat penulis harapkan guna perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam analisis kebijakan publik terhadap moda transportasi di daerah Penajam–Balikpapan.

Penajam, 31 Desember 2023
Terima kasih

Andi Bachtiar Latief

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	.i
HALAMAN PENGESAHANii
KATA PENGANTAR.....	.iii
DAFTAR ISI.....	.iv
ABSTRAK.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Batasan Penelitian.....	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Teori dan Konsep	13
1. Kebijakan Publik.....	13
2. Analisis Kebijakan Publik	20
3. Moda Transportasi	25
4. Speed dan klotok Penajam Utara	32
B. Tinjauan Empirik.....	34
C. Kerangka Konseptual	39
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Kerangka Konseptual.....	43
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	43
C. Informan Penelitian.....	44
D. Sumber Data.....	44
E. Teknik Pengumpulan Data	45
F. Teknik Analisis Data	46

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Kecamatan Penajam.....	48
B. Hasil Penelitian.....	52
C. Pembahasan.....	83
BAB V. PENUTUP	
A. Simpulan.....	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA.....	98
LAMPIRAN.....	101

ABSTRAK

"Analisis Kebijakan Publik Terhadap Moda Transportasi Speed Dan Klotok Penajam – Balikpapan"

Andi Bachtiar Latief
Mulyadi Hamid
Sri Adrianti Muin

Tujuan penelitian secara umum adalah untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan publik yang mengatur moda transportasi Speed dan Klotok di Penajam – Balikpapan, serta mendokumentasikan langkah- langkah konkret yang diambil oleh pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan transportasi laut di wilayah tersebut. Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian Analisis kebijakan moda transportasi Speed dan Klotok di Penajam– Balikpapan, berdasarkan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 31 Tahun 2017, menyoroti peran sentral Kepala Dinas Perhubungan dan koordinasi antar-seksi untuk keterpaduan kebijakan. Fokus utama mencakup evaluasi pelaksanaan tugas dan optimalisasi kinerja sektor-sektor terkait. Tantangan melibatkan regulasi, izin operasional, infrastruktur, keamanan, dan lingkungan, memerlukan koordinasi, penggunaan teknologi, dan perencanaan masa depan yang cermat. Pemantauan berkelanjutan diperlukan untuk memastikan inklusivitas dan keberlanjutan dampak sosial-ekonomi moda transportasi. Pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara mengambil langkah-langkah strategis dengan merencanakan revitalisasi dermaga, mencakup desain fisik yang ditingkatkan, penataan lahan, dan akses efisien. Langkah- langkah ini, termasuk integrasi aspek keamanan dan keselamatan, sejalan dengan komitmen Dinas Perhubungan, dan melibatkan partisipasi masyarakat lokal serta perubahan tata ruang, mencerminkan kebijakan inklusif yang memperhatikan kebutuhan dan aspirasi lokal.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Moda Transportasi, Speed dan Klotok

ABSTRACT

"Public Policy Analysis on Speed Boat and Klotok Transportation Modes in Penajam – Balikpapan"

Andi Bachtiar Latief
Mulyadi Hamid
Sri Adrianti Muin

The general objective of this research is to understand and analyze public policies regulating Speed Boat and Klotok transportation modes in Penajam – Balikpapan, as well as documenting specific steps taken by the local government to enhance the quality of maritime transportation services in the region. In this study, the author employs qualitative field research with a descriptive-analytical approach. The findings of the analysis of public policies on Speed Boat and Klotok transportation modes in Penajam–Balikpapan, based on the Regent's Regulation of Penajam Paser Utara No. 31 of 2017, highlight the central role of the Head of the Transportation Agency and inter-section coordination for policy coherence. The main focus includes evaluating task implementation and optimizing the performance of related sectors. Challenges involve regulations, operational permits, infrastructure, security, and the environment, requiring careful coordination, technological utilization, and future planning. Continuous monitoring is necessary to ensure inclusivity and sustainability of the socio-economic impacts of transportation modes. The local government of Penajam Paser Utara takes strategic steps by planning the revitalization of the dock, including improved physical design, land arrangement, and efficient access. These measures, including the integration of safety and security aspects, align with the commitment of the Transportation Agency and involve the participation of local communities and spatial changes, reflecting an inclusive policy that considers local needs and aspirations.

Keywords: Public Policy, Transportation Modes, Speed Boat, Klotok

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mobilitas pergerakan masyarakat di Penajam Paser Utara kian hari kian meningkat, seiring dengan terbentuknya Kota Nusantara yang menjadi IKN Baru di Indonesia. Nusantara adalah nama Ibu Kota Negara Baru Indonesia yang menjadi salah satu penggerak perekonomian masa depan Indonesia. Terletak di kawasan hutan tanaman industri dan masih belum banyak penduduk bermukim akan mempermudah penataan kota sejak awal. Penataan kota yang memberikan ruang hingga 75% untuk kawasan hijau akan membuat kota ini layak dihuni dan ramah lingkungan. Kota Balikpapan merupakan salah satu kota yang akan menjadi pendukung pertumbuhan perekonomian di IKN. Kota yang telah memiliki infrastruktur transportasi yang memadai seperti Bandara dan transportasi laut tentunya akan menjadikan kedua kota ini sebagai pintu masuk menuju kota Nusantara. Pembangunan IKN yang sedang berlangsung tentunya akan menghadirkan banyak penduduk Indonesia yang akan mendatangi kawasan tersebut. Para pendatang ini merupakan para masyarakat lokal, pengusaha maupun para pejabat maupun tamu undangan yang memiliki berbagai kepentingan sendiri (Puteri, 2020).

Penajam Paser Utara, salah satu Kabupaten di Kaltim, yang direncanakan menjadi Calon Ibukota Negara baru yang memiliki akses dari Kota Balikpapan yang dapat ditempuh melalui dua pilihan jalur yang dapat

ditempuh untuk menuju daerah ini dari Kota Balikpapan yaitu jalur darat dan laut. Jalur darat dapat ditempuh melalui KM 38 Jalur Trans Balikpapan – Samarinda dengan waktu tempuh sekitar 3-4 jam. Sedangkan untuk jalur laut dapat ditempuh melalui pelabuhan Balikpapan menggunakan Kapal Fery dengan waktu sekitar 1 jam sampai 1,5 jam. Jika ingin lebih cepat, dapat menggunakan *speedboat* yang dapat ditempuh dalam waktu 30 menit. Dengan meningkatnya pergerakan dalam masyarakat yang berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi laut. Sehingga akan berdampak pula pada tumbuhnya kompetisi antar moda angkutan laut penumpang. Pemilihan moda dapat dikatakan sebagai tahap terpenting dalam perencanaan transportasi. Ini karena peran kunci dari angkutan laut dalam berbagai kebijakan transportasi. Berbagai alasan dan pertimbangan yang mendasari pelaku perjalanan dalam melakukan pemilihan moda transportasi rute Penajam - Balikpapan.

Melihat antusias masyarakat Indonesia yang ingin menuju IKN sehingga transportasi di sekitar IKN menunjukkan peningkatan penumpang. Speed boat dan kapal klotok merupakan transportasi favorit yang biasa digunakan oleh kebanyakan masyarakat. Kapal klotok adalah kapal yang terbuat dari kayu dan digerakan oleh mesin diesel besar. Kapal ini mampu membawa penumpang lebih dari 20 orang dan bisa juga mengangkut kendaraan roda dua. Lain halnya Speed boat yang hanya dapat membawa penumpang hingga 10 orang (Maslina dan Fauzan, 2016).

Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Peraturan Menteri (PM) No. 20 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan dan PM No. 37 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut. Kedua PM tersebut merupakan upaya Kementerian Perhubungan untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi pengguna moda transportasi. Tujuan, diterbitkannya kedua peraturan menteri tersebut bertujuan demi terselenggaranya transportasi laut. Standar pelayanan penumpang angkutan laut meliputi standar pelayanan angkutan laut di terminal dan standar pelayanan di atas kapal.

Standar pelayanan penumpang angkutan laut di atas kapal harus memenuhi persyaratan tersedianya informasi dan fasilitas keselamatan, informasi dan fasilitas kesehatan, fasilitas keamanan dan ketertiban berupa sarana naik turun penumpang dari dan ke kapal, pos dan petugas keamanan, informasi gangguan keamanan serta peralatan dan pendukung keamanan. Sementara standar pelayanan penumpang angkutan laut di terminal harus memenuhi persyaratan adanya kemudahan untuk mendapatkan tiket, jadwal keberangkatan dan kedatangan kapal, ruang tunggu, gate boarding, toilet, tempat ibadah, lampu penerangan, fasilitas pengatur suhu, fasilitas kebersihan, ruang pelayanan kesehatan, area merokok, informasi pelayanan, informasi angkutan lanjutan, pelayanan bagasi penumpang, fasilitas penyandang difabel, ruang ibu menyusui, informasi dan fasilitas keselamatan, informasi gangguan keamanan dan kafetaria (Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 20 tahun 2015, 2015).

Transportasi laut menjadi sangat dibutuhkan dan berperan sangat vital untuk melayani perpindahan logistik berupa barang, orang, dan uang sebagai salah satu fungsi alat transportasi. Namun demikian, dibalik peran penting transportasi laut, ternyata tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi moda transportasi laut, khususnya di penajam masih menghadapi berbagai permasalahan, Saat ini moda transportasi laut yang tersedia adalah speed boat, Berdasarkan fenomena real yang ada, yakni pelabuhan yang digunakan untuk kepentingan umum adalah pelabuhan Speed dan klotok. Namun demikian kondisi pelabuhan klotok sangat memprihatinkan, baik dari sisi pelayanan maupun kondisi fisik bangunan yang jauh dari standar bagi kenyamanan dan keselamatan penumpang karena tidak dilengkapi dengan sarana penunjang yang layak.

Disamping itu yang menjadi permasalahan yang sangat penting yakni terkait alas hak dari klotok dan speed,, lahan yang digunakan masih merupakan milik pribadi, sehingga pengembangan untuk moda transportasi klotok dan speed penajam–Balikpapan, sehingga tidak ada pengembangan untuk prasarana angkutan tersebut, Hal ini disebabkan karena kepemilikan dan kegiatan operasional pelabuhan dikuasai oleh perorangan, sehingga menyulitkan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan dan pengembangan prasarana angkutan speed dan klotok tersebut. Walaupun dengan fasilitas pendukung yang sangat minim, masyarakat masih menggunakan klotok sebagai sarana utama untuk menyeberang ke Balikpapan atau sebaliknya. Hal ini disebabkan karena angkutan klotok lebih murah, waktu tempuh yang

tidak terlalu lama (\pm 30 - 60 menit), lebih cepat dibandingkan dengan Kapal Ferry penyeberangan dengan waktu tempuh secara keseluruhan rata-rata 1,5 jam dan relatif lebih aman khususnya pada musim hujan atau gelombang besar. Berikut ini disajikan data jumlah armada dan penumpang Klotok Dan Speed Boat di Tahun 2022:

Tabel 1.1 Data Armada Klotok dan Speed Boat Tahun 2022

No	Bulan	Speed Boat		Klotok	
		Berangkat	Tiba	Berangkat	Tiba
1	Januari	856	5690	580	480
2	Februari	921	813	431	421
3	Maret	1417	935	583	571
4	April	1330	1275	603	525
5	Mei	1940	1660	1328	1256
6	Juni	1464	1406	998	781
7	Juli	1304	1160	175	976
8	Agustus	1438	1376	84	747
9	September	1283	1141	94	879
10	Oktober	1306	1164	1028	923
11	November	1397	1254	941	838
12	Desember	2501	2371	1386	1178

Sumber: Dinas Perhubungan Kebudayaan dan Pariwisata, Kabupaten Penajam Paser Utara

Tabel 1.2 Data Penumpang Klotok dan Speed Boat Tahun 2022

No	Bulan	Speed Boat		Klotok	
		Berangkat	Tiba	Berangkat	Tiba
1	Januari	5992	5690	11600	9600
2	Februari	6453	6550	8620	8420
3	Maret	9920	8922	11660	11420
4	April	9315	8715	12060	10500
5	Mei	13580	11622	26560	25120
6	Juni	10245	9845	19600	15620
7	Juli	9125	8120	21500	19520
8	Agustus	10063	9630	16940	14940
9	September	8985	7985	18050	17580
10	Oktober	9146	8147	20560	18640
11	November	9772	8777	18820	16772
12	Desember	17508	16598	26729	23560

Sumber: Dinas Perhubungan Kebudayaan dan Pariwisata, Kabupaten Penajam Paser Utara

Berdasarkan data tersebut, menjelaskan bahwa Tabel 1.1 Data Armada Klotok dan Speed Boat Tahun 2022 yang setiap bulannya mengalami peningkatan untuk jumlah armada speed boat sedangkan

klotok, meskipun mengalami fluktuasi tiap bulannya namun klotok tetap menjadi salah satu armada transportasi laut yg juga digemari masyarakat untuk dipergunakan hal ini dapat dilihat di Tabel 1.2, Data Penumpang Klotok dan Speed Boat Tahun 2022 , jumlah penumpang baik berangkat maupun yang tiba yg menggunakan moda transportasi klotok mengalami peningkatan sampai di bulan penumpang yang berangkat mencapai 26.729 dan yang tiba 23.560 penumpang, begitu pula dengan moda transportasi speed boat yang menjadi pilihan transportasi yang dipergunakan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi awal melalui hasil wawancara di lokasi penelitian jumlah penumpang rata-rata perhari di Pelabuhan Speed Boat dan Klotok Penajam pada hari biasanya, kian mengalami peningkatan penumpang dan pada hari-hari besar bisa melonjak lima kali lipat dari hari biasa. Dengan meningkatnya pergerakan dalam masyarakat yang berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi laut khususnya speed boat dan klotok menjadi pilihan masyarakat karena belum adanya jembatan yang menghubungkan Penajam dengan Balikpapan maka dibutuhkan transportasi laut untuk mempermudah akses dari Penajam ke Balikpapan dan sebaliknya.

Perkembangan transportasi laut di Penajam yang tentunya sangat memegang peranan penting. Namun peran transportasi laut di Penajam masih banyaknya di temui permasalahan dan kekurangan atas moda transportasinya, khususnya pada moda transportasi Klotok dan *Speed*

Penajam-Balikpapan, pemerintah sebagai pembuat kebijakan dituntut untuk dapat mengikuti permintaan dan kebutuhan masyarakat. Untuk itu diperlukan koordinasi yang baik dari setiap faktor penentu kebijakan yang langsung atau tidak langsung kebijakannya berpengaruh terhadap kinerja sistem transportasi dan aksesibilitas moda transportasi yang ada khususnya, untuk moda transportasi transportasi Klotok dan *Speed* di Penajam Utara.

Dampak sosial pembangunan Kota Nusantara dan peningkatan infrastruktur transportasi di Penajam Paser Utara mencakup peningkatan mobilitas dan aksesibilitas masyarakat, memungkinkan akses lebih mudah ke berbagai wilayah, meningkatkan konektivitas, dan memperluas jangkauan ekonomi serta sosial. Selain itu, pertumbuhan ekonomi lokal didorong oleh peningkatan mobilitas, dengan kedatangan penduduk baru, pelaku usaha, dan pejabat pemerintahan menciptakan peluang baru dalam sektor ekonomi, seperti perdagangan, jasa, dan industri. Penataan ruang yang berkelanjutan, dengan memberikan 75% kawasan kota untuk ruang hijau, meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menciptakan lingkungan yang sehat serta keseimbangan ekosistem.

Secara ekonomi, dampak mencakup peningkatan kegiatan ekonomi melalui infrastruktur transportasi yang memadai, mendukung pertumbuhan sektor ekonomi, terutama perdagangan dan pariwisata. Kota Balikpapan dan sekitarnya, sebagai pendukung pertumbuhan perekonomian IKN, dapat menarik investasi, meningkatkan daya tarik bisnis, menciptakan

peluang pekerjaan, dan mendorong investasi infrastruktur. Dampak sektor transportasi juga terlihat dalam peningkatan bisnis di sektor transportasi laut, seperti speed boat dan kapal klotok, dengan kebutuhan akan layanan yang handal memacu pertumbuhan bisnis.

Namun, tantangan yang dihadapi termasuk pengelolaan ruang dan lingkungan dengan pemeliharaan kawasan hijau, manajemen pertumbuhan penduduk, dan implementasi langkah-langkah keselamatan dan keamanan transportasi laut. Pengelolaan sumber daya yang efisien dan berkelanjutan juga menjadi tantangan, termasuk penggunaan lahan dan perlindungan terhadap lingkungan. Keseimbangan sosial-ekonomi harus dijaga melalui distribusi merata dari keuntungan ekonomi dan penyediaan akses pendidikan serta layanan kesehatan yang merata. Analisis ini memberikan gambaran menyeluruh tentang kompleksitas dampak dan tantangan yang dihadapi oleh Penajam Paser Utara seiring dengan perkembangan Kota Nusantara dan pertumbuhan infrastruktur transportasi.

Weimer & Vining (1992:1) dalam (Meutia, 2017) merumuskan analisis kebijakan berorientasi pelanggan yang relevan dengan keputusan-keputusan publik dan didasarkan pada nilai-nilai sosial. Fokus dari analisis kebijakan adalah merumuskan berbagai alternatif dan memilih salah satu dari antaranya untuk direkomendasikan sebagai suatu kebijakan yang akan ditetapkan. Keberadaan kebijakan publik memiliki fokus utama yakni pelayanan publik, dimana prioritas dari pencapaian negara terhadap pertahanan dan peningkatan kualitas hidup lebih diutamakan dan

diunggulkan. Tidak hanya berfokus pada pelayanan publik, namun kebijakan publik harus bisa mengakomodasi berbagai kepentingan dan menyatukan kepentingan yang banyak untuk mencapai prioritas dan urgent dalam menata kepentingan yang lebih umum (Rodiyah, Choiriyah, & Sukmana, 2022). Namun kenyataannya, tidak semua kebijakan mengalami proses yang rasional seperti ini. Dalam kenyataannya, proses kebijakan merupakan proses yang rumit dan kompleks karena dipengaruhi oleh tarik-menarik antara berbagai kepentingan dan berbagai aktor, dipengaruhi pula oleh latar belakang pengalaman implementasi kebijakan terkait atau kebijakan sebelumnya, di'arah'kan oleh berbagai 'suara' kelompok kepentingan, dan biasanya memasuki ranah politik kepentingan.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi tersebut diartikan sebagai situasi yang tidak diinginkan atau tidak diharapkan dan harus dihilangkan, diatasi atau dihindari melalui pemikiran atau pertimbangan serta tindakan yang tepat. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik mengkaji “**Analisis Kebijakan Publik terhadap Moda Transportasi Speed dan Klotok Penajam - Balikpapan**”, Secara garis besar penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan sebuah rekomendasi yang dapat menjadi pilihan kebijakan untuk membenahi kendala-kendala yang dihadapi terkait kebijakan publik publik terhadap moda transportasi Speed dan Klotok Penajam-Balikpapan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan survei pendahuluan dapat diketahui bahwa moda transportasi speed dan klotok yang belum memiliki alas hak yang mengatur keberadaan moda transportasi khususnya pada transportasi speed dan klotok, padahal perkembangan moda transportasi speed dan klotok di daerah tersebut terus meningkat, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana analisis kebijakan publik terhadap moda transportasi Speed dan Klotok di Penajam – Balikpapan
2. Langkah-langkah yang diambil pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan transportasi laut”?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini secara umum adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan publik yang mengatur moda transportasi Speed dan Klotok di Penajam – Balikpapan,
2. Mendokumentasikan langkah-langkah konkret yang diambil oleh pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan transportasi laut di wilayah tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagi Institusi

Sebagai pertimbangan untuk pembuatan draf usulan mengenai kebijakan publik kebijakan publik terhadap moda transportasi speed dan klotok Penajam – Balikpapan dan rencana serta implikasi pelaksanaan kebijakan publik terhadap moda transportasi speed dan klotok Penajam - Balikpapan.

2. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah Ilmu Manajemen dan ilmu sosial, khususnya terkait analisis kebijakan publik terhadap moda transportasi speed dan klotok Penajam – Balikpapan.

3. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rekomendasi bagi Pemerintah Kabupaten Penajam dan Kota Balikpapan, khususnya bagi jajaran birokrasi pemerintah Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam sehingga dapat menjadi bahan masukan dan perbaikan dalam penyusunan kebijakan publik terhadap moda transportasi speed dan klotok Penajam - Balikpapan.

E. Batasan Penelitian

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan yang mengatur terkait moda transportasi speed dan klotok Penajam–Balikpapan.
2. Memngalisis terkait bentuk kebijakan yang dibutuhkan untuk mendukung pengembangan moda transportasi speed dan klotok Penajam–Balikpapan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Konsep dan Teori

1. Kebijakan Publik

Kebijakan melibatkan perilaku seperti halnya, bisa berupa tindakan dan bukan tindakan. Kebijakan menunjuk pada serangkaian tindakan yang bertujuan. Kebijakan memiliki *outcomes* di masa depan. Kebijakan juga menunjuk pada serangkaian tindakan, muncul dari proses yang melibatkan hubungan organisasional. Kebijakan juga melibatkan peran dari para agen kebijakan (Handoyo, 2018). (Friedrich, 1969) mengartikan kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan

Menurut Tachjan dalam (Herdiana, 2018), bahwa substansi kebijakan hakikatnya merupakan kesepakatan dari suatu keputusan dari beberapa rangkaian pilihan yang berhubungan satu sama lain. Kebijakan pada dasarnya ialah suatu kegiatan dari pemerintah yang mengatur kehidupan masyarakat maupun publik. Untuk menciptakan pembangunan yang optimal, pemerintah menciptakan beberapa kebijakan yang nantinya digunakan untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan utama dan menyelesaikan masalah di masyarakat. Lahirnya suatu kebijakan publik tidak lain karena ada landasan yang digunakan untuk menyelesaikan

masalah yang terjadi di masyarakat. Tidak lain kegunaan kebijakan publik diorientasikan untuk pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang pada awal kebijakan ditetapkan oleh para pihak (*stakeholders*) (Ramdhani, 2017).

Menurut (Mustari, 2015), kebijakan publik merupakan kewenangan pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya dalam hubungannya dengan masyarakat dan dunia usaha. Pada dasarnya kebijakan pemerintah dalam menata kehidupan masyarakat di berbagai aspek merupakan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik (masyarakat). Pengertian kebijakan (*policy*) adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Dalam setiap penyusunan kebijakan publik diawali oleh perumusan masalah yang telah diidentifikasi kemudian pelaksanaan kebijakan tersebut ditujukan untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam masyarakat.

Menurut (Handoyo, 2018), kebijakan publik, termasuk di dalamnya adalah tata kelola negara (*governance*), mengatur interaksi antara negara dengan rakyatnya. Pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana signifikansi kebijakan publik sebagai komponen negara. Sebagaimana dijelaskan Nugroho (2009), setiap pemegang kekuasaan pasti berkepentingan untuk mengendalikan negara, sekaligus juga mengelola negara. Mengelola berarti mengendalikan dengan menjadikannya lebih bernilai. Pemerintah suatu negara dalam mengelola negara, tidak hanya

mengendalikan arah dan tujuan negara, tetapi juga mengelola negara agar lebih bernilai melalui apa yang disebut dengan kebijakan publik.

Kebijakan publik dalam pandangan (Dye, 2005) dan (Anderson, 2000), bukan sekadar keputusan yang menghasilkan aktivitas-aktivitas yang terpisah. Sebagaimana dilihat Richard Rose, kebijakan dipandang sebagai serangkaian panjang aktivitas yang saling berhubungan (Anderson, 2000) dalam (Islamy, 2014). Makna kebijakan (Dye, 2005) maupun (Anderson, 2003), tidak semata-mata berkaitan dengan apa yang dapat atau tidak dapat dilakukan pemerintah, tetapi lebih dari itu, kebijakan publik menyangkut sejumlah aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Menurut (Isabela, 2022), kebijakan publik dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis, yaitu:

- 1) Kebijakan Substantif: Kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah.
- 2) Kebijakan Prosedural: Kebijakan mengenai bagaimana kebijakan substantif dapat dijalankan.
- 3) Kebijakan Distributif: Kebijakan yang menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat.
- 4) Kebijakan Regulatori: Kebijakan yang berupa pembatasan atau larangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat.
- 5) Kebijakan Redistributif: kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, kepemilikan di antara berbagai kelompok masyarakat.

- 6) Kebijakan Material: Kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya konkret pada kelompok sasaran.
- 7) Kebijakan Simbolis: Kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.
- 8) Kebijakan yang Berhubungan dengan Barang Umum atau Public Goods: Kebijakan yang bertujuan mengatur pemberian barang atau pelayanan publik.
- 9) Kebijakan Barang Privat atau Privat Goods: Kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

Menurut Howlet dan Ramesh, 1995:11 dalam (Nurani, 2009), menyatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan sebagai berikut :

- a. Penyusunan agenda (*agenda setting*), yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah
- b. Formulasi Kebijakan (*policy formulation*), yakni proses perumusan pilihanpilihan kebijakan oleh pemerintah
- c. Pembuatan kebijakan (*decision making*), yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan tindakan
- d. Implementasi kebijakan (*policy implementation*), yakni proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil
- e. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*), yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan

Adapun tahapan-tahapan yang harus ditempuh atau dilakukan untuk dapat memecahkan berbagai masalah publik di gambarkan pada gambar 2.1 siklus kebijakan publik berikut ini:



Gambar 2.1 siklus kebijakan publik

Berdasarkan gambar 2.1 tersebut dijelaskan bahwa, tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn dalam (Rodiyah et al., 2022) adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda adalah sebuah *fase* dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah ada ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan agenda publik perlu diperhitungkan. Jika sebuah isu telah menjadi masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain. Dalam penyusunan agenda juga sangat penting

untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah.

Isu kebijakan (*policy issues*) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (*policy problem*). *Policy issues* biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut. Penyusunan agenda kebijakan seyogianya dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder. Sebuah kebijakan tidak boleh mengaburkan tingkat urgensi, esensi, dan keterlibatan *stakeholder*.

2. Formulasi kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

3. Adopsi (Legitimasi Kebijakan)

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu

masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah. Mendukung. Dukungan untuk rezim cenderung berdifusi - cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota mentolerir pemerintahan disonansi. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu. Di mana melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.

4. Penilaian (Evaluasi Kebijakan)

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah- masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Kebijakan publik erat hubungannya dengan administrasi pemerintahan. Kebijakan publik pada dasarnya merupakan keputusan lembaga atau pejabat pemerintahan yang bertujuan mengatur kehidupan publik baik secara langsung maupun tidak langsung, baik dengan cara memilih suatu cara bertindak

maupun dengan cara tidak memilih tindakan apapun (no action policy) untuk menciptakan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat luas (Suandi et al., 2022). Maka kebijakan publik merupakan salah satu aspek penting yang ada dalam praktek kehidupan bernegara. Berdasarkan hal tersebut maka, buku ini menyajikan segala yang dibutuhkan oleh para pengelola kebijakan dalam menjalankan roda perputaran pimpinannya agar dapat menciptakan kualitas dan kuantitas suatu tatanan pemerintahan yang baik.

2. Analisis Kebijakan Publik

Analisis kebijakan publik adalah aktivitas menciptakan pengetahuan dan proses pembuatan kebijakan. Dalam menciptakan pengetahuan tentang proses pembuatan kebijakan analisis kebijakan, meneliti sebab, akibat, dan kinerja kebijakan dan program publik. Secara sederhana analisis kebijakan adalah untuk merumuskan masalah sebagai pencarian solusi (Arsyad, 2020).

Analisis yang menghasilkan dan menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga dapat memberikan landasan bagi para pembuat kebijakan dalam membuat keputusan. Analisis kebijakan ialah proses atau kegiatan mensintesa informasi, termasuk hasil-hasil penelitian, untuk menghasilkan rekomendasi opsi desain kebijakan publik (Simatupang, 1992) . Kebijakan publik ialah keputusan atau tindakan pemerintah yang berpengaruh atau mengarah pada tindakan individu dalam kelompok masyarakat (Williams, 1971). Menurut (Hadna, 2018)

Dari definisi di atas kiranya dapat dirumuskan karakteristik dasar analisis kebijakan (Simatupang, 1992):

1. Pertama, analisis kebijakan merupakan suatu proses atau kegiatan "sintesa" informasi yang berarti pemaduan berbagai informasi, termasuk hasil penelitian, sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang selaras. Hal ini berarti obyek analisis kebijakan ialah proses penyusunan dan paket kebijakan. Kegiatan utama analisis kebijakan ialah pengumpulan informasi secara sistematis dan penarikan kesimpulan logis dari informasi tersebut. Dengan demikian, analisis kebijakan berdasarkan pada kaidah ilmiah.
2. Kedua, salah satu sumber utama informasi yang menjadi bahan analisis kebijakan ialah hasil-hasil penelitian. Hal ini berarti bahwa analisis kebijakan merupakan proses pengolahan lebih lanjut dari hasil-hasil penelitian sehingga siap digunakan dalam pengambilan keputusan dan desain kebijakan publik. Oleh karena itu, analisis kebijakan merupakan salah satu bentuk diseminasi hasil-hasil penelitian.
3. Ketiga, output analisis kebijakan ialah rekomendasi opsi keputusan atau desain kebijakan publik. Hal ini berarti bahwa output kebijakan adalah berupa nasehat atau petunjuk operasional tentang bahan pengambilan keputusan publik bagi spesifik klien. Oleh karena itu, analisis kebijakan haruslah disajikan secara jelas, singkat, padat, lengkap dan seksama.

4. Keempat, klien analisis kebijakan ialah para pengambil keputusan kebijakan publik (pemerintah dan DPR) dan kelompok yang berkepentingan (*interest groups*) atas kebijakan pemerintah tersebut. Klien pengguna analisis kebijakan bersifat spesifik. Hal ini berkaitan langsung dengan output analisis kebijakan yang berupa nasehat tentang kebijakan publik.
5. Kelima, analisis kebijakan berorientasi klien (*client oriented*). Hal ini merupakan implikasi dari sifat analisis kebijakan yang menghasilkan nasehat keputusan siap-guna bagi klien spesifik. Tanpa berorientasi klien analisis kebijakan tak akan mungkin siap guna. Hal ini berarti analisis kebijakan haruslah didasarkan pada "dari, oleh dan untuk klien". Analisis kebijakan hanya dilakukan apabila ada permintaan atau "patut diduga" benar-benar dibutuhkan kliennya. Analisis kebijakan didorong oleh kebutuhan mendesak kliennya (*client's need push*).

Menurut (Hadna, 2018), analisis kebijakan menghasilkan Informasi tentang:

- a. Masalah kebijakan (*policy problems*) : nilai, kebutuhan, atau kesempatan yang belum terpenuhi, yang dapat diidentifikasi, untuk kemudian diperbaiki atau dicapai melalui tindakan publik.
- b. Masa depan kebijakan (*policy future*) : konsekuensi dari serangkaian tindakan untuk pencapaian nilai-nilai.

- c. Aksi kebijakan (*policy action*) : serangkaian tindakan yang dituntun oleh alternatif kebijakan yang dirancang untuk mencapai masa depan yang bernilai.
- d. Hasil Kebijakan (*policy outcome*) : konsekuensi yang teramati dari aksi kebijakan.
- e. Kinerja Kebijakan (*policy performance*) : derajat pencapaian nilai-nilai dari hasil kebijakan.

Manurut (Nurani, 2009) dan (Akib, 2020), analisis kebijakan publik menjelaskan bahwa implementasi kebijakan di pengaruhi oleh empat variabel, yakni : (1) komunikasi, (2)sumberdaya, (3)disposisi, (4)struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) hingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

2. Sumberdaya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk

melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdata tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni sumberdata adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal dikertas menjadi dokumen saja.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuatan kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (Standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung akan melemahkan penguasaan yang menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks ini pada gilirannya menyebabkan aktifitas organisasi tidak fleksibel.

Menurut (Mustari, 2015), ada empat elemen utama dalam kebijakan public, keempat elemen utama inilah yang menjadi dasar yang menentukan bentuk-bentuk kebijakan publik yang diterapkan. Adapun keempat elemen utama tersebut yaitu :

- a. Input, adalah hal-hal yang mempengaruhi kebijakan publik seperti manusia (aktor), pengetahuan dan teknologi, informasi serta nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.
- b. Tujuan (goals), merupakan arah dari suatu kebijakan yang ingin dicapai oleh pembuat kebijakan.
- c. Perangkat (instruments), alat-alat yang digunakan dalam menjalankan suatu kebijakan.
- d. Dampak, hasil yang diperoleh dari suatu kebijakan baik yang diinginkan maupun yang tidak.

Analisis kebijakan terdiri dari analisis terhadap kebijakan dan analisis bagi penyusunan kebijakan, dalam analisis kebijakan kita dapat menganalisis pembentukan, substansi, dan dampak dari kebijakan kebijakan tertentu, siapa aktor aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan serta apa dampak dari kebijakan tersebut. Analisis ini juga dilakukan tanpa pretense untuk menyetujui atau menolak suatu kebijakan. Ada hal pokok yang perlu diperhatikan dalam analisis kebijakan publik.

3. Moda Transportasi

Pembangunan sektor transportasi perlu diarahkan demi terwujudnya sistem transportasi yang handal, berkemampuan tinggi dan

diselenggarakan secara efektif dan efisien. Dalam sasaran Sistem Transportasi Nasional (Sistranas) disebutkan efektif dalam arti selamat, aksesibilitas tinggi, terpadu, kapasitas cukup, teratur, lancar dan cepat, mudah dicapai, tepat waktu, nyaman, tarif terjangkau, tertib, aman serta polusi rendah (Stellamaris, 2017).

Menurut (Iswarah, Andi. Idris, Adam. Hasanah, 2018), transportasi merupakan bidang yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, mengingat kebutuhan masyarakat Indonesia akan transportasi sangat tinggi. Dewasa ini, pembangunan transportasi bertujuan meningkatkan pelayanan jasa transportasi efisien, efektif, handal, berkualitas nasional terpadu dengan pembangunan wilayah, sistem distribusi yang dapat memberikan pelayanan masyarakat, meningkatkan jaringan desa kota memadai.

Pada dasarnya jenis moda transportasi secara umum terbagi menjadi tiga, diantaranya transportasi darat, transportasi laut dan transportasi udara. Namun yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah mengenai moda transportasi laut.

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17.499 pulau. Pulau-pulau itu dipisahkan oleh laut dan selat, sehingga untuk menghubungkan antara pulau satu dengan yang lainnya dibutuhkan sarana transportasi yang memadai, menurut (Wicaksana & Rachman, 2018), kapal laut merupakan sarana yang penting di dalam aktifitas hubungan antara masyarakat dari pulau yang satu dengan pulau yang lainnya.

Menurut (Mardiani, Anwar, & Sultan, 2013), transportasi adalah suatu kegiatan pemindahan barang atau muatan dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain melalui sarana angkutan yang tersedia misalnya dengan menggunakan suatu moda angkutan laut dengan sarana dan prasarana yang tersedia pula. Pengembangan transportasi laut diarahkan untuk mempersatukan seluruh Indonesia, mampu mengantisipasi perkembangan internasional, regional, dan nasional. Moda transportasi laut merupakan salah satu sarana yang turut menjadi bagian penting dalam menunjang aktivitas penyebrangan laut (Wirati, Antari, & Rahajeng, 2021).

Moda transportasi laut merupakan pilihan untuk mengangkut penumpang ataupun barang dalam jumlah besar, kecepatan, dan biaya angkutan per ton mil, relatif rendah, dan sangat menguntungkan untuk proses pengangkutan barang maupun penumpang dalam jarak tempuh yang jauh terkhususnya pada wilayah kepulauan. Pengembangan transportasi angka pendek dan menengah berdasarkan kriteria pengembangan aringan transportasi nasional meliputi : fungsi kota dalam tata ruang nasional, pola produksi dan konsumsi, faktor geografis dan moda yang paling ekonomis dalam melayani arus barang dan penumpang. Untuk daerah yang secara ekonomis tidak mempunyai potensi atau daerah yang belum berkembang, namun membutuhkan pelayanan transportasi, maka pelayanan transportasi berfungsi untuk membantu perkembangan ekonomi daerah tersebut (Fabiana, 2019).

Sesuai dengan keputusan Menteri Perhubungan No. 33 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan angkutan laut yang menyebutkan bahwa Angkutan Laut adalah setiap kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal untuk mengangkut penumpang, barang atau hewan dalam suatu perjalanan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut.

Menurut (Maslina dan Fauzan, 2016), transportasi air mengangkut orang dan barang atau kargo. Transportasi air masih menjadi sarana pengangkutan barang terbesar di dunia, walaupun lebih lambat dibandingkan transportasi air modern merupakan cara yang efektif untuk memindahkan barang dalam jumlah yang besar. Biaya untuk transportasi air lebih rendah dari transportasi udara untuk pelayaran antar benua. Bagi Indonesia, peranan transportasi air khususnya di daerah sangat penting karena daerah yang dipisahkan oleh danau, teluk, sungai, untuk menghubungkan penduduk antara satu pulau dengan pulau yang lain dengan menggunakan angkutan air, namun untuk daerah pedalaman bisa jadi menjadi satu-satunya moda angkutan untuk akses ke pasar dan kegiatan sosial lainnya. Moda angkutan dapat berupa rakit bambu sampai kapal bermotor yang bisa beroperasi di sungai kecil, danau sampai sungai besar.

Menurut (Badan Kebijakan Transportasi, 2023) dalam fungsinya, dimana transportasi memiliki fungsi pelayanan mobilitas orang, barang, dan jasa baik lokal, regional, nasional, serta peranannya sebagai pendukung

pembangunan sektor lainnya, maka pembangunan transportasi menjadi hal yang krusial bagi pembangunan nasional demi terwujudnya sistem integrasi jaringan prasarana dan jaringan pelayanan transportasi serta khususnya system logistic yang terintegrasi, mendorong pengembangan wilayah, dan memperkokoh konektivitas masyarakat kepualuan dengan kondisi fisik, sosial dan ekonominya. Pelayanan transportasi sungai ditujukan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah, baik antar desa, desa-kota dan antar pusat-pusat pertumbuhan. Sehingga kebutuhan logistik masyarakat (sembako) dan pelayanan dasar (kesehatan, sekolah, pemerintahan) dapat berjalan dengan optimal. Hal ini diarahakan pada karakteristik wilayah dimana transportasi sungai menjadi urat nadi utama dalam interaksi antar wilayah dan merupakan warisan sejarah yang terus bertahan hingga saat ini dan wilayah pertumbuhan dan pengembangan berada pada wilayah lahan basah yang luas, berawa, sekitar muara sungai besar dan sulit dikembangkan transportasi darat. Strategi utama pengembangan transportasi sungai antara lain: (a) Peningkatan pelayanan dengan modernisasi Pelabuhan atau dermaga (b) Pembangunan Pelabuhan atau dermaga baru (c) Pembangunan halte sungai (d) Peningkatan keselamatan kapal (e) Peningkatan standar pelayanan minimum angkutan sungai dengan kepastian jadwal dan rute atau trayek (f) Penentuan atau penetapan alur dan trayek (g) Pembangunan rambu lalu-lintas (h) Sosialisasi kepada operator tentang tertib berlayar (i) Pemanfaatan teknologi digital berbasis android dalam pelayanan pencatatan manifes penumpang.

Namun begitu, tipe pelayanan transportasi sungai tidak seluruhnya berupa jaringan pelayaran sungai, akan tetapi bisa berupa penyeberangan. Dimana artinya tipe pelayanan transportasi sungai sebagai alat penyeberangan karena akses jalan yang terputus oleh sungai atau bahkan hanya penyeberangan antara sisi sungai yang satu dengan sisi sungai lainnya sebagai jalan pintas karena akses jalan yang berputar. Dengan demikian, pengembangan jenis pelayanan transportasi ini menjadikan penyeberangan sungai sebagai sebuah *shortcut*. Dimana di dalam pengembangan transportasi sungai terdapat beberapa strategi utama, yaitu (a) Penyiapan standar teknis dermaga penyeberangan sungai (b) Penyiapan standar teknis kapal penyeberangan sungai (c) Revitalisasi dermaga penyeberangan sungai (d) Pembangunan dermaga penyeberangan baru (e) Peningkatan keselamatan kapal penyeberangan sungai (f) Peningkatan standar pelayanan minimum penyeberangan sungai dengan kepastian jadwal (g) Peningkatan pengelolaan dan pengawasan operasional penyeberangan sungai, dan (h) Sosialisasi keselamatan lalu-lintas dan angkutan penyeberangan sungai.

Sementara itu, menurut (Badan Kebijakan Transportasi, 2023) daerah yang berpotensi tumbuh cepat dapat dengan segera berperan sebagai pendorong pemerataan atau memacu pertumbuhan wilayah sekitarnya dan daerah yang menunjang perkembangan sektor-sektor strategis bernilai ekonomis dengan konsep *Inland Waterways*. Transportasi sungai perlu digalakkan karena keberadaannya memberikan gambaran

tentang kemampuan daerah dan kemampuan memproduksi masyarakat, khususnya dalam intergrasi jaringan prasarana dan jaringan pelayanan transportasi dengan kawasan sekitarnya sebagai “*hub*” (penghubung) dengan daerah lainnya. Untuk daerah produsen komoditas ekonomis yang sebagian besar wilayahnya hanya bisa ditempuh lewat jalur sungai, pilihan jasa transportasi ini menjadi sektor potensial yang layak untuk dikembangkan karena sangat penting dalam menunjang percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah. Strategi utama pengembangan transportasi sungai antara lain adalah (1) Revitalisasi Pelabuhan (2) Pembangunan Pelabuhan baru (3) Penyediaan kapal (4) Pembangunan fasilitas transfer moda (5) Normalisasi sungai (6) Pembangunan terminal terpadu antar moda (7) Peningkatan manajemen navigasi (8) Penguatan manajemen syahbandar, dan (9) Sosialisasi keselamatan pelayaran.

Moda transportasi sungai dianggap menjadi jawaban dan diperlukan sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memberikan aksesibilitas yang lebih baik sehingga dapat mengakomodir peningkatan kebutuhan mobilitas penduduk disepanjang daerah aliran sungai serta berfungsi melayani transportasi yang menjangkau semua wilayah. Strategi utama pengembangan transportasi sungai pada pengembangan keperintisan ini antara lain (1) Peningkatan kualitas pelabuhan atau dermaga (2) Pembangunan pelabuhan atau dermaga baru (3) Peningkatan standar pelayanan minimum angkutan sungai dengan kepastian jadwal dan rute atau trayek (4) Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola (5)

Penyusunan standar formulasi penentuan tarif, dan (6) Penyusunan SOP Kerjasama dengan pihak ketiga dalam pemberian subsidi.

4. Speed dan klotok Penajam Utara

Kapal Klotok adalah kapal kecil yang terbuat dari kayu dan digerakan oleh mesin diesel. Selain mengangkut penumpang dan barang, klotok juga sanggup membawa kendaraan roda dua. Karena dapat membawa kendaraan roda dua itulah klotok menjadi salah satu alternatif transportasi bagi warga Balikpapan yang menyeberang ke Penajam dengan kendaraan dan tidak memakan waktu yang lama (Maslina dan Fauzan, 2016). Kapal kayu atau klotok adalah perahu atau kapal rakyat ukuran kecil yang bisa memuat kira-kira 15 sampai 20 orang, yang digunakan sebagai sarana transportasi sehari-hari untuk berbagai kebutuhan. Baik untuk mengangkut penumpang untuk menyeberang, atau menuju suatu tujuan seperti belanja maupun untuk mengangkut barang. Berikut adalah gambar kapal kayu atau klotok.



Gambar 2. 2 Kapal kayu atau klotok

Kapal klotok atau kapal kayu ini merupakan salah satu transportasi alternatif bagi masyarakat yang ingin berpergian ke Balikpapan maupun Penajam (Samir, 2019). Dengan menggunakan kapal klotok waktu tempuh

sekitar 20 sampai 45 menit melalui Pelabuhan Kampung Baru dan Pelabuhan Penajam. Untuk biaya, untuk penumpang setiap orang dikenakan biaya Rp 10 ribu sementara untuk sepeda motor Rp 35 ribu. Selama ini, warga banyak memilih untuk naik kapal klotok karena selain murah juga aman dan langsung di pelabuhan Kampung Baru Balikpapan.

Naik speed bagi sebagian masyarakat juga menjadi alternatif apalagi yang ingin cepat sampai di Balikpapan maupun Penajam. Melalui pelabuhan speed boat Penajam dan Kampung Baru, Balikpapan, waktu tempuh untuk speed boat ini tak cukup lama hanya sekitar 30 menit. Namun untuk biaya, bervariasi karena bila melalui tiket harga sekitar Rp 15 ribu namun bila langsung sekitar Rp 25 ribu sampai Rp 30 ribu. Beda lagi bila dicarter bisa mencapai Rp 100 ribu lebih. Berikut adalah gambar speed.



Gambar 2.3 Speed Boat

B. Tinjauan Empirik

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Mapping Penelitian Terdahulu

No.	Penulis dan Judul Penelitian	Desain dan Metodologi	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	(Nampira, Jainuri, & Yumitro, 2022) Kebijakan Pemerintah dalam Pembangunan Transportasi di Daerah Perbatasan (Studi Tentang Pembangunan Dan Pengoperasian Pelabuhan Di Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor - NTT)	Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: Observasi dan Wawancara serta Dokumentasi.	Pemerintah daerah harus berinovasi dalam memperoleh dana dari pihak swasta agar pembangunan ifrastruktur cepat terlaksanakan., Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus lebih ditingkatkan dalam membangun konektivitas, sehingga perlu disamakan visi dengan mengedepankan peran BAPPENAS, Perlu adanya keberanian pemerintah untuk merelokasikan belanja infrastruktur yang lebih bermanfaat bagi masyarakat dan Menyelesaikan permasalahan yang timbul di sekitar pelabuhan ini, sehingga tidak hanya aktivitas pelabuhan yang dapat berjalan dengan baik, tapi juga dapat memberikan pengaruh yang positif bagi masyarakat sekitar.	Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas Kebijakan dan menggunakan pendekatan kualitatif, namun perbedaannya pada penelitian ini, membahas terkait kebijakan public terhadap moda transportasi laut laut speed dan klontok penajam di Balikpapan sedangkan pada penelitian sebelumnya membahas terkait kebijakan public dalam hal upaya Pemerintah Kabupaten Alor dalam pembangunan dan pengoprasian pelabuhan di Kecamatan Alor Barat Laut
2.	(Kadarisman, Suharto, & Majid, 2016) Formulasi Kebijakan Sistem Transportasi Laut	Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan transportasi laut dalam mewujudkan angkutan tol laut modern dan peningkatan pembangunan. Penelitian	Hasil penelitian sebagai berikut: 1) kebijakan Pemerintah mengenai tol laut adalah untuk melayari angkutan barang, menjamin ketersediaan barang, mengurangi disparitas harga dan menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan barang ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan; 2) kebijakan pembangunan transportasi laut diarahkan di	Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas Kebijakan publik dan menggunakan pendekatan kualitatif, namun perbedaannya pada penelitian ini, membahas terkait kebijakan public terhadap moda transportasi laut laut speed dan klontok penajam di Balikpapan sedangkan pada penelitian sebelumnya ini membahas terkait bahaimana kebijakan transportasi laut dalam

		menggunakan metode deskriptif-kualitatif.	<p>antaranya meningkatkan peran armada pelayaran nasional baik angkutan dalam negeri maupun ekspor-impor dengan memberlakukan azas cabotage; menghapuskan pungutan tidak resmi di pelabuhan melalui peningkatan koordinasi bagi semua instansi terkait proses bongkar muat barang dan memenuhi standar pelayaran internasional serta pelaksanaan International Ship and Port Security; merestrukturisasi peraturan perundangan pelayaran dan pelaksanaannya, serta kelembagaan di subsektor transportasi laut guna menciptakan kondisi yang mampu menarik minat swasta dalam pembangunan prasarana transportasi laut; 3) kebijakan transportasi laut ditetapkan sebagai urat nadi peningkatan pembangunan nasional untuk kelancaran arus manusia, barang, maupun informasi. Kebijakan ini merupakan penunjang tercapainya pengalokasian sumber-sumber perekonomian secara optimal, sehingga jasa transportasi laut cukup tersedia merata dan terjangkau daya beli masyarakat.</p>	mewujudkan angkutan tol laut modern dan peningkatan pembangunan.
3.	(Manurung, 2019) Kebijakan dan Strategi Pengembangan Transportasi Laut di Indonesia	Metode analisis yang digunakan dengan studi literature dan study kasus	<p>Terdapat 12 pilar utama pengembangan transportasi laut berdasarkan kecenderungan perkembangan global dan industri maritime, perencanaan pengembangan pelabuhan (khususnya oleh swasta) harus berorientasi kepada kecenderungan demand secara global serta perlu perencanaan yang matang dengan berorientasi kepada potensi dan perhitungan kelayakan (finansial dan ekonomi) yang tepat (memerlukan outline</p>	<p>Persamaan pada penelitian ini sama-sama membahas terkait kebijakan untuk transportasi laut, namun perbedaan penelitian ini dengan peneliti sebelumnya ini membahas studi kasus transportasi laut di Indonesia melalui metode analisis dengan studi literature dan study kasus, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif terkait kebijakan publik terhadap moda transportasi laut laut speed dan klontok penajam di Balikpapan.</p>

			bussiness case dan financial bussiness case yang ditetapkan secara komprehensif).	
4.	(Cahyandi, 2020), Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Eksistensi Transportasi Laut Guna Meningkatkan Kelancaran Sirkulasi Barang dan Orang di Kecamatan Kampung Laut Kabupaten Cilacap	Sumber informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah responden dari salah satu desa di Kecamatan Kampung Laut yang paling dekat dengan pelabuhan penyeberangan. Data dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif dengan mendeskripsikan karakteristik dan kondisi subjek penelitian serta menganalisis data yang diperoleh secara deskriptif.	1. Diperlukan pengadaan dan pengelolaan sarana transportasi laut yang memadai, dalam hal kapasitas dan rutinitas menuju Kecamatan kampung Laut. 2. Dampak Ekonomi keberadaan pelabuhan Seleko adalah sebagai jalur perekonomian bagi masyarakat daerah Laguna Segara Anakan khususnya kampung laut perlu terus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk berdagang bagi warga Kampung Laut. 3. Masyarakat Kampung Laut perlu menjalin Jejaring Sosial sebagai sebuah strategi untuk meningkatkan taraf hidup, dengan asumsi bahwa dengan membangun jejaring sosial yang lebih luas maka masyarakat Kampung Laut lebih memiliki kekuatan untuk bisa mengatasi masalah yang dihadapi dalam kehidupannya atau lebih berdaya, sehingga memberikan pengaruh terhadap tingkat kesejahteraannya.	Persamaan pada penelitian ini adalah sama sama menggunakan pendekatan kualitatif dan menganalisis terkait transportasi laut, namun perbedaan dengan penelitian terdahulu ini adalah membahas peran transportasi laut dalam mendukung arus barang dan orang di Kecamatan Kampung Laut Kabupaten Cilacap. sedangkan penelitian ini menggunakan terkait kebijakan publik terhadap moda transportasi laut laut speed dan klontok penajam di Balikpapan.
5.	(Akhyary, Bekti, Sinaga, & Buchori, 2019), Analisis Sumber Daya Dalam Implementasi Kebijakan Transportasi Laut Wilayah Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan proses penelitian dilakukan secara sistematis melalui teknik in-depth interview, Observasi, Studi literatur dan FGD dan mempelajari data dan	Bahwasanya kebijakan subsidi transportasi laut khususnya angkutan kapal PT Peln dan angkutan perintis pada saat ini masih diperlukan, disamping itu juga harus ada peningkatan terhadap sarana dan prasarana transportasi laut (kapal penumpang). Untuk menghindari kelangkaan kapal pada trayek liner dan tramper perlu dilakukan pembenahan trayek, untuk menghindari ketiadaan/ kelangkaan kapal terutama pada saat libur dan hari besar serta musim	Persamaan pada penelitian ini sama sama menggunakan pendekatan kualitatif, namun untuk perbedaannya, paa penelitin terdahulu ini menganalisis implementasi kebijakan transportasi laut dengan menganalisis dari sisi sumber daya yang terkait sedangkan penelitian ini membahas terkait kebijakan publik terhadap moda transportasi laut laut speed dan klontok penajam di Balikpapan.

		menganalisis informasi yang relevan	gelombang. Dengan demikian peningkatan sumberdaya yang diperlukan dalam hal ini armada kapal masih sangat dibutuhkan untuk mendapatkan kinerja implementasi kebijakan yang baik. Penambahan jumlah armada untuk mengurangi round voyage yang lebih pendek, 3-6 hari sekali baik untuk kapal perintis maupun untuk kapal Pelni dengan round voyage 10-15 hari (dengan modifikasi kapal 3 in 1 sebagai kapal penumpang, kargo dan kendaraan), penambahan home base di wilayah Kabupaten Natuna dan Anambas.	
6.	Paramita, R. (2024). "Reviewing the Implementation of Public Service Obligation Policies in the Transportation Sector.	Hasil studi tentang PSO di PT KAI dan PT Pelni dari jurnal, penelitian, dan media digunakan dalam penelitian ini, yang menggunakan metodologi kualitatif dan data sekunder berupa data peraturan, data pengembangan, dan implementasi PSO.	terdapat perbedaan dalam pelaksanaan teknologi PSO untuk penyediaan layanan transportasi di Indonesia. Perbedaan ini menetapkan peran PSO bukan hanya sebagai instrumen pemerintah untuk memberikan transportasi yang terjangkau kepada penduduk, khususnya yang berpenghasilan rendah, tetapi juga sebagai tujuan lain yang harus dipenuhi.	<p>Persamaan: Persamaan: Kedua penelitian memiliki fokus pada analisis kebijakan publik, dengan yang satu meninjau implementasi PSO di sektor transportasi, sementara yang lain menganalisis kebijakan terhadap moda transportasi laut, laut speed, dan klontok penajam di Balikpapan</p> <p>Perbedaan: Lingkup penelitian dan objek studi: Penelitian pertama lebih terfokus pada PSO di sektor transportasi secara umum, dengan objek studi di PT Pelni dan PT KAI. Sementara penelitian kedua lebih spesifik, membahas moda transportasi laut, laut speed, dan klontok penajam di Balikpapan.</p>
7	Kadarisman, M., Yuliantini, & Abdul Majid, S. (2016). Formulasi Kebijakan Sistem	Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan transportasi laut dalam mewujudkan angkutan tol	1) kebijakan Pemerintah mengenai tol laut adalah untuk melayari angkutan barang, menjamin ketersediaan barang, mengurangi disparitas harga dan menjamin kelangsungan	Persamaan pada objek penelitian: Penelitian pertama lebih umum, mencakup analisis kebijakan transportasi laut secara menyeluruh, sedangkan penelitian kedua lebih spesifik,

	Transportasi Laut [Policy Formulation of Sea Transportation System].	laut modern dan peningkatan pembangunan. Penelitian menggunakan metode deskriptif-kualitatif.	<p>elayanan penyelenggaraan angkutan barang ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan; 2) kebijakan pembangunan transportasi laut diarahkan di antaranya meningkatkan peran armada pelayaran nasional baik angkutan dalam negeri maupun ekspor-impor dengan memberlakukan azas <i>cabotage</i>; menghapuskan pungutan tidak resmi di pelabuhan melalui peningkatan koordinasi bagi semua instansi terkait proses bongkar muat barang dan memenuhi standar pelayaran internasional serta pelaksanaan <i>International Ship and Port Security</i>; merestrukturisasi peraturan perundangan pelayaran dan pelaksanaannya, serta kelembagaan di subsektor transportasi laut guna menciptakan kondisi yang mampu menarik minat swasta dalam pembangunan prasarana transportasi laut; 3) kebijakan transportasi laut ditetapkan sebagai urat nadi peningkatan pembangunan nasional untuk kelancaran arus manusia, barang, maupun informasi.</p>	<p>membahas moda transportasi laut, laut speed, dan klontok penajam di Balikpapan. Sedangkan persamaan Fokus pada Kebijakan Transportasi Laut: Kedua penelitian memiliki fokus pada kebijakan transportasi laut, dengan yang satu menganalisis kebijakan untuk mewujudkan angkutan tol laut modern dan peningkatan pembangunan, sementara yang lain menganalisis kebijakan terhadap moda transportasi laut, laut speed, dan klontok penajam di Balikpapan.</p>
--	--	---	--	--

Sumber: Penelitian Terdahulu

C. Kerangka Konseptual

Berdasarkan survei pendahuluan diketahui bahwa moda transportasi speed dan klotok yang belum memiliki alas hak yang mengatur keberadaan moda transportasi khususnya pada transportasi speed dan klotok, yang perkembangan moda transportasi speed dan klotok di daerah tersebut terus meningkat. Belum adanya kebijakan pemerintah daerah akan alas hak yang mengatur moda transportasi speed dan klotok Penajam – Balikpapan yang menyebabkan moda transportasi ini belum mengalami perkembangan yang optimal. Dalam konteks "Analisis Kebijakan Publik Terhadap Moda Transportasi Speed dan Klotok Penajam–Balikpapan," penggunaan kerangka konseptual siklus hijau dapat memberikan pendekatan yang terintegrasi terhadap dampak kebijakan terhadap moda transportasi tersebut. Berikut adalah kerangka konseptual yang terfokus pada siklus hijau:

1. Perumusan Kebijakan

- a. Identifikasi kebijakan publik yang berkaitan dengan moda transportasi Speed dan Klotok di rute Penajam – Balikpapan.
- b. Evaluasi tujuan kebijakan dan dampak potensial pada aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.

2. Implementasi Infrastruktur

- a. Analisis tahap implementasi infrastruktur transportasi, termasuk pembangunan pelabuhan dan fasilitas penunjangnya.

- b. Evaluasi metode konstruksi, penggunaan sumber daya, dan dampak lingkungan selama tahap ini.

3. Peningkatan Mobilitas dan Aksesibilitas

- a. Analisis dampak peningkatan mobilitas terhadap masyarakat, termasuk aspek sosial dan ekonomi.
- b. Evaluasi aksesibilitas dan konektivitas yang ditingkatkan sebagai hasil dari kebijakan tersebut.

4. Dampak Sosial-Ekonomi

- a. Pemantauan dampak pertumbuhan ekonomi lokal dan distribusi manfaat kepada masyarakat setempat.
- b. Evaluasi perubahan dalam pola pekerjaan dan pendapatan penduduk terkait dengan moda transportasi tersebut.

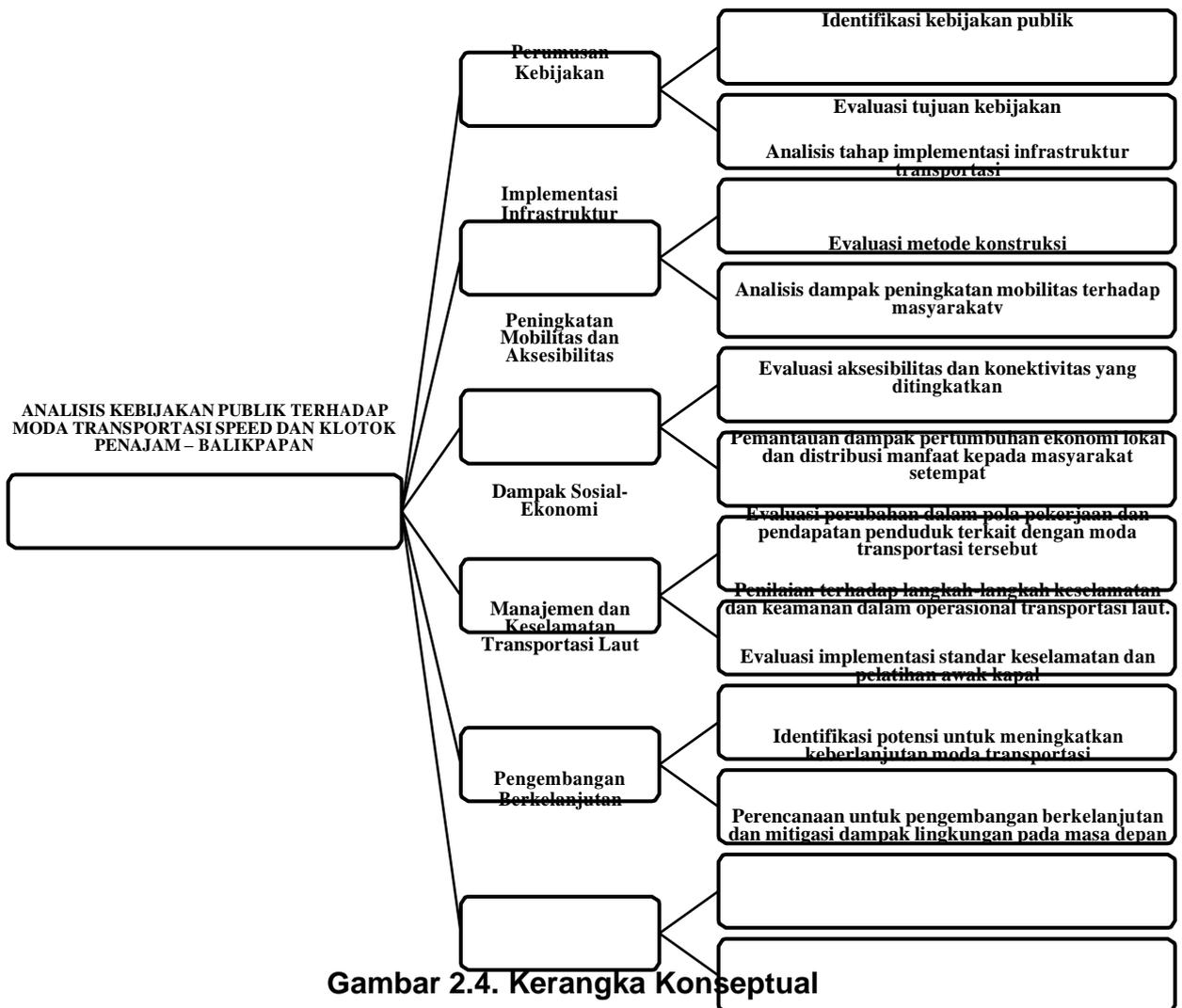
5. Manajemen dan Keselamatan Transportasi Laut

- a. Penilaian terhadap langkah-langkah keselamatan dan keamanan dalam operasional transportasi laut.
- b. Evaluasi implementasi standar keselamatan dan pelatihan awak kapal.

6. Pengembangan Berkelanjutan

- a. Identifikasi potensi untuk meningkatkan keberlanjutan moda transportasi, termasuk adopsi teknologi ramah lingkungan atau penerapan praktik daur ulang.
- b. Perencanaan untuk pengembangan berkelanjutan dan mitigasi dampak lingkungan pada masa depan.

Penelitian ini bertujuan ingin mengkaji bagaimana bentuk kebijakan yang dibutuhkan untuk mendukung pengembangan moda transportasi speed dan klotok Penajam–Balikpapan. Oleh sebab itu, kerangka konsep yang digunakan, digambarkan seperti pada gambar 2.4 berikut ini:



Gambar 2.4. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini menggambarkan interaksi kompleks antara kebijakan publik, implementasi infrastruktur, operasional moda transportasi, dan dampaknya pada aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Melalui pendekatan siklus hijau, analisis kebijakan dapat lebih komprehensif dan terfokus pada keberlanjutan dalam pengembangan moda transportasi tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan deskriptif analitis. Penelitian kualitatif adalah penelitian terhadap suatu proses, peristiwa, atau perkembangan dimana bahan-bahan atau data yang dikumpulkan berupa keterangan-keterangan kualitatif yang hasil penelitiannya tidak untuk dijadikan sebagai generalisasi sebagaimana penelitian kuantitatif (Rusdi, 2007). Peneliti berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang dalam situasi-situasi tertentu.

Pendekatan kualitatif ini digunakan karena data yang dibutuhkan berupa sebaran-sebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasikan. Dimana dalam penelitian ini peneliti akan menghimpun informasi menggunakan pendekatan deskriptif analitik terkait analisis kebijakan publik terhadap moda transportasi speed dan klotok Penajam - Balikpapan

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara tepatnya di Pelabuhan speed dan klotok Kelurahan Penajam. Peneliti menggunakan penelitian ini karena keadaan lokasi yang mudah dijangkau juga memperoleh data-data yang sesuai, menjawab persoalan dan fenomena yang terjadi sesuai dengan pokok

fokus masalah yang diajukan. Adapun waktu penelitian dimulai pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2023.

C. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber informasi dari para informan penelitian, karena data yang diperoleh dari informan kunci. Maka sumber Informasi dalam penelitian ini adalah informan. Yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah 6 informan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang memahami dengan terkait kebijakan publik terhadap moda transportasi speed dan klotok Penajam - Balikpapan .

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti akan mengeksplorasi jenis data kualitatif berupa kata-kata dan tindakan yang terkait dengan masing-masing fokus penelitian yang sedang diamati. Menurut Sarwono, data kualitatif dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan. Sedangkan data sekunder yaitu berupa data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh peneliti dengan cara membaca, melihat mendengar.

Berdasarkan informasi yang diberikan, kita dapat mengklasifikasikan sumber data menjadi:

1. Sumber Data Primer

- a) Teks hasil wawancara dengan informan, yakni pemerintah daerah Penajam Paser Utara dan masyarakat setempat terkait proses analisis kebijakan publik terhadap moda transportasi speed dan klotok Penajam Paser Utara.. Informasi ini diperoleh langsung dari interaksi peneliti dengan informan melalui wawancara.
- b) Informasi terkait proses analisis kebijakan publik terhadap moda transportasi speed dan klotok yang diperoleh dari informan.

2. Sumber Data Sekunder

Dokumen peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang digunakan sebagai landasan hukum dalam penelitian. Data ini tidak diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan tetapi merupakan data yang sudah ada dan dapat diakses oleh peneliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Berikut adalah teknik pengumpulan data yang digunakan yang digunakan:

1. Studi Dokumentasi: Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, dan menganalisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah, seperti dokumen kebijakan, laporan, data statistik, dan dokumen-dokumen lainnya. Metode ini berguna untuk memperoleh informasi mengenai isu dan masalah yang

dihadapi oleh pemerintah daerah serta analisis dan evaluasi kebijakan yang telah dilaksanakan.

2. Wawancara: Metode ini dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dengan para pemangku kepentingan terkait kebijakan pemerintah daerah, seperti pejabat pemerintah, pengusaha, masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat. Metode ini berguna untuk memperoleh sudut pandang berbagai pihak mengenai kebijakan dan masalah yang dihadapi, serta mendapatkan informasi yang lebih detail mengenai implementasi dan dampak kebijakan.
3. Observasi: Metode ini dilakukan dengan mengamati langsung keadaan dan situasi di lapangan, misalnya dengan melakukan kunjungan ke daerah terkait kebijakan pemerintah atau mengikuti kegiatan terkait kebijakan tersebut. Metode ini berguna untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi di lapangan serta mendapatkan informasi yang tidak terdokumentasi dalam bentuk dokumen atau wawancara.

F. Teknik Analisis Data

Tahap-tahap analisis menggunakan teori Miles, Huberman dan Saldana yaitu (Sugiyono, 2007):

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*) Kondensasi data merujuk kepada proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi dan mentransformasi data yang terdapat pada catatan lapangan maupun transkrip.

2. Penyajian Data (*Data Display*) Data hasil kegiatan kondensasi kemudian disajikan berdasarkan aspek-aspek yang diteliti. Dengan menyajikan data akan mempermudah memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing and verification*) Langkah ketiga dalam analisis kualitatif adalah melakukan pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan buktibukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Miles, Huberman, & Saldana, 2014).



¹³ Sugiyono, *Metode...*, hlm. 338-345.

¹⁴ Miles, M.B, dkk., *Qualitative...*, hlm. 14.

Gambar 3.1 Analisis data Model Miles, Huberman dan Saldana

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum lokasi penelitian

Deskripsi umum lokasi penelitian terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara, tepatnya di Kecamatan Penajam Kelurahan Penajam, menggambarkan pelabuhan speed dan klotok sebagai gerbang utama bagi mereka yang mengunjungi atau datang ke Kabupaten Penajam Paser Utara dari Kota Balikpapan. Selain itu, pelabuhan ini juga berfungsi sebagai akses utama menuju Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat dari Trans Kalimantan. Dengan posisinya yang strategis, pelabuhan ini menjadi titik penting dalam konektivitas transportasi di wilayah tersebut, berperan sebagai pintu gerbang yang vital untuk perjalanan antarwilayah di Kalimantan.

Lokasi penelitian ini mencakup karakteristik geografis yang menciptakan tantangan dan peluang unik dalam pengembangan kebijakan transportasi. Demografi yang beragam di sekitar wilayah penelitian juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi dinamika transportasi. Keberagaman budaya di daerah ini dapat membentuk preferensi dan kebutuhan transportasi yang berbeda. Selain itu, struktur pemerintahan setempat memiliki peran signifikan dalam mengelola dan mengimplementasikan kebijakan transportasi. Adanya potensi daerah, baik dari segi ekonomi maupun pariwisata, juga menjadi pertimbangan penting dalam merancang kebijakan yang berkelanjutan dan berdaya saing. Semua

faktor ini bersama-sama membentuk lanskap yang kompleks dan memerlukan pendekatan kebijakan yang holistik dan terinformasi. Seperti yang dijelaskan dibawah ini:

1. **Geografi**

Kabupaten Penajam Paser Utara terletak di Provinsi Kalimantan Timur dan merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Paser. Luas wilayahnya adalah 3.333,06 kilometer persegi, menjadikannya Kabupaten/Kota terkecil keempat di Provinsi Kalimantan Timur. Wilayah ini berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kota Balikpapan, dan Selat Makassar.

2. **Demografi**

Jumlah penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara mencapai 178.681 jiwa pada tahun 2020, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,18 persen antara tahun 2010-2020. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2019 adalah 71,64.

3. **Kebudayaan**

Mayoritas penduduknya adalah Suku Paser, dengan budaya yang memiliki persamaan dengan Suku Dayak. Suku Paser berasal dari peradaban "Bansu Tatau Datai Danum" yang hidup di pantai, sungai, dan danau.

4. Pemerintahan

Kabupaten Penajam Paser Utara didirikan pada tanggal 10 April 2002 berdasarkan Undang-undang RI No. 07 Tahun 2002. Motto pemerintah daerahnya adalah "Benuo taka," yang berarti Daerah Kita atau Kampung Halaman Kita.

Untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Selain itu, pembangunan IKN juga menjadi faktor yang dapat memengaruhi infrastruktur dan transportasi di wilayah ini.

Gambaran umum lokasi penelitian ini juga memberikan konteks yang penting untuk memahami latar belakang dan potensi daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara. Beberapa hal penting yang dapat dihubungkan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)

Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi perbincangan setelah ditetapkan sebagai lokasi Ibu Kota Negara baru berdasarkan UU IKN No. 3 Tahun 2022 dan dengan adanya pembangunan IKN menjadi faktor penting dalam menganalisis kebijakan publik terhadap moda transportasi, karena hal ini dapat mempengaruhi perencanaan dan pengembangan sistem transportasi di wilayah tersebut.

2. Infrastruktur Transportasi

Artikel menyebutkan cara menuju Penajam Paser Utara dengan transportasi darat, laut, dan udara. Ini menunjukkan keragaman moda transportasi yang tersedia di wilayah tersebut dan jembatan

Pulau Balang I disebutkan sebagai salah satu akses penghubung menuju IKN Nusantara. Akses jalan tersebut belum selesai dikerjakan, yang bisa menjadi aspek penting dalam analisis kebijakan terkait transportasi.

3. Potensi Pariwisata dan Perkebunan

Potensi pariwisata di Kabupaten Penajam Paser Utara, termasuk tempat wisata pantai dan destinasi lainnya, dapat menjadi pertimbangan dalam perencanaan kebijakan transportasi untuk mendukung industri pariwisata dan sektor perkebunan yang memiliki potensi menjanjikan, yang juga dapat memengaruhi kebijakan transportasi terutama dalam distribusi hasil pertanian dan kebutuhan infrastruktur yang mendukung sektor tersebut.

4. Aspek Demografi dan Pemerintahan

Jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, dan indeks pembangunan manusia dapat memberikan gambaran tentang tingkat mobilitas dan kebutuhan transportasi masyarakat dan pemimpin daerah dan pemerintahan setempat juga memiliki peran dalam membentuk dan mengimplementasikan kebijakan transportasi.

Sehingga dengan pertimbangan aspek-aspek tersebut, analisis kebijakan transportasi di Kabupaten Penajam Paser Utara perlu memperhatikan dinamika pembangunan, potensi ekonomi, kebutuhan masyarakat, dan infrastruktur yang berkaitan dengan transportasi. Faktor-

faktor ini dapat menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan dalam konteks pengembangan moda transportasi Speed dan Klotok di wilayah tersebut.

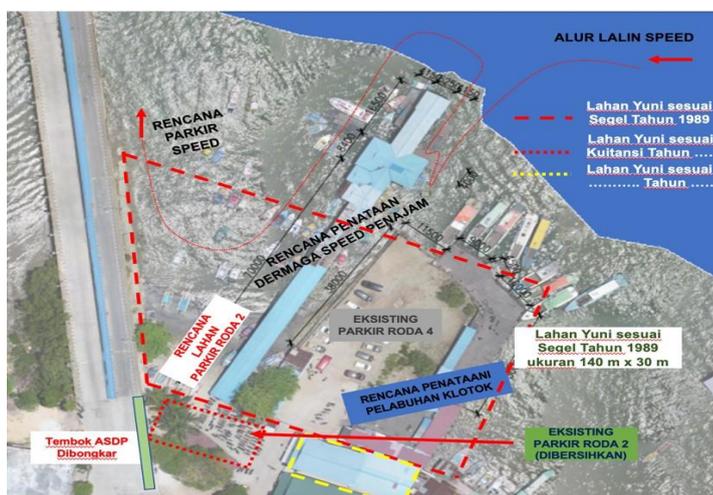
B. Hasil Penelitian

a. Analisis kebijakan publik terhadap moda transportasi Speed dan Klotok di Penajam – Balikpapan

1) Kolaborasi Swasta dalam Pengembangan Transportasi Berkelanjutan di Penajam– Balikpapan

Berdasarkan hasil observasi di lokasi penelitian, hasil penelitian ini menekankan kolaborasi dengan pihak swasta menjadi elemen penting dalam mengimplementasikan kebijakan transportasi. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa kerjasama dengan operator transportasi swasta dapat meningkatkan ketersediaan, keamanan, dan kenyamanan layanan transportasi. Kerjasama semacam ini mencakup investasi dalam infrastruktur, pelatihan sumber daya manusia, dan promosi pariwisata. Selain itu, rencana penataan dermaga speed Penajam dan klotok tahun 2024-2025, seperti yang tergambar pada gambar 4.3, menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur transportasi. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, operator transportasi swasta, dan komunitas lokal, implementasi kebijakan transportasi dapat berhasil dengan lebih efektif dan efisien. Hal ini menggarisbawahi pentingnya koordinasi lintas sektor dan partisipasi semua pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan pembangunan transportasi yang

inklusif dan berkelanjutan di Penajam–Balikpapan. Rencana penataan dermaga speed penajam dan klotok tahun 2024 – 2025, yang tergambar pada gambar 4.3 di bawah ini:



Gambar 4.3 Rencana Penataan Dermaga Speed Penajam Dan Klotok Tahun 2024 – 2025

Rencana penataan dermaga Speed Penajam dan Klotok untuk tahun 2024-2025 dirancang dengan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan dan infrastruktur di area tersebut. Berikut adalah yang akan diimplementasikan:

1. **Penyediaan Sarana Ruang Tunggu yang Nyaman**

Direncanakan penyediaan ruang tunggu yang nyaman bagi penumpang Speed Boat dan Klotok. Ruang tunggu ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan penumpang sekaligus memberikan pengalaman perjalanan yang lebih baik.

2. **Penyediaan Sarana Air Bersih dan WC/Toilet**

Untuk memenuhi kebutuhan dasar penumpang, direncanakan penyediaan sarana air bersih dan toilet di area dermaga. Hal ini

bertujuan untuk memberikan fasilitas yang memadai dan mendukung kebersihan di sekitar dermaga.

3. **Pelayanan Langsung oleh Dinas Perhubungan (Dishub)**

Pelayanan di dermaga, termasuk penanganan administrasi dan operasional, direncanakan dilaksanakan langsung oleh Dinas Perhubungan (Dishub). Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan di dermaga.

4. **Bantuan Life Jacket untuk Izin Motoris**

Bantuan Life Jacket akan diberikan sebagai dasar pembuatan atau perpanjangan izin motoris Speed Boat dan Klotok. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan selama perjalanan dan mendorong ketaatan terhadap regulasi keselamatan pelayaran.

5. **Peningkatan Retribusi Dermaga Speed**

Direncanakan peningkatan retribusi dermaga Speed dengan disertai penyediaan sarana prasarana yang lebih baik. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan mendukung pemeliharaan serta pengembangan dermaga.

6. **Peningkatan Retribusi Klotok**

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan bersumber dari peningkatan retribusi Klotok. Hal ini sejalan dengan potensi pengembangan layanan Klotok dan kontribusinya terhadap aktivitas transportasi di wilayah tersebut.

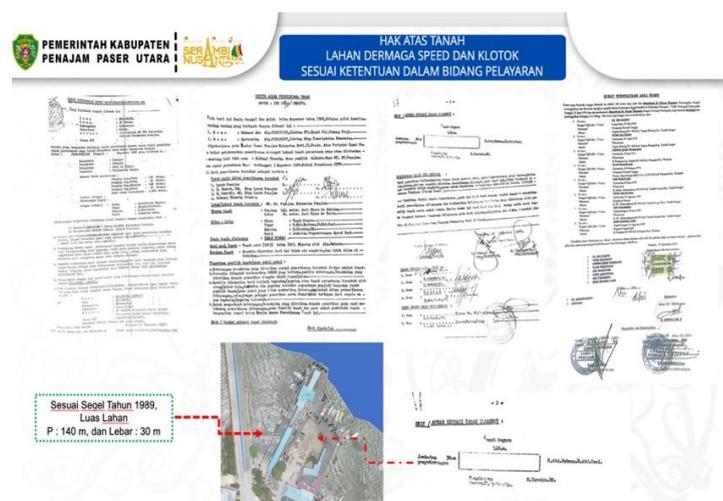
7. Peninggian Lantai Jembatan Penyeberangan

Adanya peninggian muka air pasang di Dermaga Speed – Klotok menjadi perhatian. Oleh karena itu, direncanakan peninggian lantai jembatan penyeberangan ke dermaga untuk menjaga keamanan dan kelancaran akses penumpang.

8. Penyediaan Lahan Parkir Areal Klotok

Penyediaan lahan parkir area Klotok direncanakan untuk memudahkan pengguna jasa Klotok, terutama dalam menghadapi potensi peninggian muka air pasang. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pelayanan dan penggunaan area dermaga.

Rencana ini mencerminkan komitmen untuk meningkatkan kualitas layanan, keselamatan, dan efisiensi operasional di dermaga Speed Penajam dan Klotok. Implementasi rencana ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat pengguna jasa transportasi di wilayah tersebut serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.



Gambar 4.4 Hak atas tanah untuk lahan dermaga Speed dan Klotok

Hak atas tanah untuk lahan dermaga Speed dan Klotok, sebagaimana diatur dalam ketentuan Segel Tahun 1989, menjadi landasan penting dalam mengembangkan kebijakan publik terhadap moda transportasi Speed dan Klotok di wilayah Penajam – Balikpapan.

Pertama, keberadaan Segel Tahun 1989 memberikan arah dan regulasi yang jelas terkait pengelolaan dan pemanfaatan lahan dermaga. Kebijakan publik dapat memanfaatkan ketentuan dalam segel tersebut untuk merinci persyaratan teknis, administratif, dan hukum yang perlu dipatuhi oleh pemilik atau pengelola dermaga, sehingga dapat dijamin keberlanjutan operasional dan keselamatan transportasi air.

Luas lahan dermaga yang telah ditetapkan sebesar 140 meter (panjang) dan 30 meter (lebar) menjadi dasar perencanaan dan pengembangan optimal area dermaga. Kebijakan publik dapat memperhatikan dimensi lahan ini untuk menentukan kapasitas dermaga, merencanakan infrastruktur pendukung, dan memastikan kelancaran operasional.

Terkait dengan bidang pelayaran, hak atas tanah ini secara khusus menandakan bahwa lahan tersebut diperuntukkan bagi kegiatan transportasi air, termasuk dermaga untuk Speed Boat dan Klotok. Oleh karena itu, kebijakan publik dapat diarahkan untuk mendukung pengembangan dan peningkatan layanan kedua moda transportasi tersebut.

Persyaratan teknis dan administratif yang diatur dalam Segel Tahun 1989 menjadi pedoman bagi pemilik atau pengelola dermaga dalam mengelola dan memanfaatkan lahan tersebut. Kebijakan publik dapat memperkuat penegakan persyaratan ini untuk mencapai standar keamanan, lingkungan, dan infrastruktur dermaga yang optimal.

Dengan memberikan dasar hukum untuk pengembangan dan pemeliharaan dermaga, kebijakan publik dapat mendorong pemangku kepentingan untuk aktif terlibat dalam menjaga keberlanjutan operasional dan keamanan area tersebut. Ini mencakup peninggian lantai jembatan penyeberangan sebagai respons terhadap potensi peningkatan muka air pasang.

Kaitannya dengan Analisis Kebijakan Publik terhadap moda transportasi Speed dan Klotok di Penajam – Balikpapan, hak atas tanah ini memberikan dasar yang kuat untuk merumuskan kebijakan yang terfokus pada pengembangan infrastruktur dermaga, penerapan standar keselamatan, dan peningkatan kualitas layanan. Kolaborasi dengan pihak swasta dan komunitas lokal dapat menjadi strategi efektif dalam mewujudkan kebijakan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan moda transportasi di wilayah tersebut.

**2) Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 31 Tahun 2017
Tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok Dan Fungsi
Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara**

a. Berdasarkan Bab II Pasal 2 yang menguraikan Tugas Pokok dan

Fungsi Kepala Dinas Perhubungan, dapat disimpulkan bahwa Kepala Dinas Perhubungan memegang peran sentral dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan seluruh aspek urusan pemerintah daerah di bidang perhubungan, kebudayaan, dan pariwisata. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Perhubungan bertanggung jawab atas perumusan kebijakan, penetapan rencana strategis, dan pengelolaan program-program di Dinas Perhubungan. Fungsi-fungsi yang diemban mencakup distribusi tugas, koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah lain, pengendalian pelaksanaan tugas, penjalinan kerja sama, evaluasi program, serta pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati. Dengan tugas dan fungsi yang komprehensif, Kepala Dinas Perhubungan memiliki peran strategis dalam mencapai tujuan dan keberhasilan program kerja Dinas Perhubungan secara menyeluruh.

- b. Dari Pasal 11 Bab II yang membahas Seksi Angkutan Perairan, dapat disimpulkan bahwa Kepala Seksi Angkutan Perairan memegang peranan penting dalam melaksanakan tugas operasional lalu lintas di bawah kepemimpinan Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan. Tugas tersebut melibatkan penyiapan berbagai rencana kegiatan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, dengan fokus pada aspek tugas, permasalahan, kebutuhan, dan kebijaksanaan di Seksi Angkutan Perairan. Fungsi yang diemban mencakup perumusan strategi pengembangan program, pembagian tugas, serta pembimbingan dan

pengawasan pelaksanaan kegiatan terkait Angkutan Perairan. Dengan adanya evaluasi dan pelaporan secara berkala, Kepala Seksi Angkutan Perairan bertanggung jawab dalam memastikan pencapaian program dan menanggapi permasalahan yang dihadapi, sekaligus menjalankan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

- c. Dari Pasal 14 Bab II yang mengatur Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana, dapat disimpulkan bahwa Kepala Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana memiliki tanggung jawab utama dalam merumuskan kebijakan, melaksanakan kebijakan, serta melakukan evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan dan Pembangunan Prasarana perhubungan. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kepala Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana mengatur rencana kegiatan, melakukan pembagian tugas, serta memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan Perencanaan dan Pembangunan Prasarana. Evaluasi pelaksanaan kegiatan, baik secara lisan maupun tertulis, menjadi kewajiban guna memastikan pencapaian program dan menanggapi permasalahan yang mungkin timbul. Selain itu, Kepala Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana juga menjalankan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan, sehingga memastikan optimalisasi kinerja di sektor Perencanaan dan Pembangunan Prasarana Dinas Perhubungan.

d. Berdasarkan Pasal 19 Bab II, dapat disimpulkan bahwa Kepala Seksi Pemaduan Moda Dan Teknologi Perhubungan memiliki tanggung jawab utama dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, serta melakukan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Seksi Pemaduan Moda Dan Teknologi Perhubungan mengkoordinasikan rencana kegiatan, melakukan pembagian tugas, serta memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan Pemaduan Moda Dan Teknologi Perhubungan. Evaluasi pelaksanaan kegiatan, baik secara lisan maupun tertulis, menjadi kewajiban guna memastikan pencapaian program dan menanggapi permasalahan yang mungkin timbul. Selain itu, Kepala Seksi Pemaduan Moda Dan Teknologi Perhubungan juga menjalankan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan, sehingga memastikan optimalisasi kinerja di sektor Pemaduan Moda Dan Teknologi Perhubungan Dinas Perhubungan.

Berdasarkan Pasal 2, 11, 14, dan 19 yang mengatur Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Seksi Angkutan Perairan, Kepala Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana, serta Kepala Seksi Pemaduan Moda Dan Teknologi Perhubungan dalam Dinas Perhubungan, dapat diidentifikasi beberapa aspek yang berkaitan dengan analisis kebijakan publik terhadap moda transportasi Speed dan Klotok Penajam – Balikpapan.

1. Pengelolaan dan Perumusan Kebijakan

Kepala Dinas Perhubungan, sesuai Pasal 2, memiliki peran sentral dalam memimpin, merumuskan, dan mengendalikan kebijakan di bidang perhubungan. Keterlibatan Kepala Seksi Angkutan Perairan, Kepala Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana, serta Kepala Seksi Pemaduan Moda Dan Teknologi Perhubungan juga diperlukan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan terkait moda transportasi.

2. Koordinasi Antar Seksi

Pasal 2 dan Pasal 11 menunjukkan pentingnya koordinasi antar-seksi, khususnya antara Seksi Angkutan Perairan, Perencanaan dan Pembangunan Prasarana, dan Pemaduan Moda Dan Teknologi Perhubungan. Koordinasi ini menjadi relevan dalam konteks analisis kebijakan, terutama untuk memastikan keterpaduan dan keserasian kebijakan terkait moda transportasi di wilayah Penajam-Balikpapan.

3. Evaluasi dan Pelaporan

Seluruh pasal yang mencakup tugas dan fungsi Kepala Dinas, Kepala Seksi Angkutan Perairan, Kepala Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana, dan Kepala Seksi Pemaduan Moda Dan Teknologi Perhubungan menekankan pada evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas. Hal ini penting dalam menganalisis dampak kebijakan terhadap moda transportasi di daerah tersebut.

4. Optimalisasi Kinerja

Dari Pasal 14 dan Pasal 19 terlihat bahwa Kepala Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana serta Kepala Seksi Pemaduan Moda Dan Teknologi Perhubungan memiliki tanggung jawab dalam optimalisasi kinerja di sektor masing-masing. Hal ini menjadi relevan dalam konteks analisis kebijakan untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas moda transportasi yang digunakan.

Secara keseluruhan, regulasi tersebut menciptakan kerangka kerja yang dapat digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi kebijakan publik terhadap moda transportasi Speed dan Klotok di Penajam – Balikpapan. Dengan melibatkan berbagai sektor dan melihat aspek-aspek evaluasi, dapat dihasilkan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang dampak kebijakan terhadap sistem transportasi di wilayah tersebut.

3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran memiliki kaitan yang relevan dengan analisis kebijakan publik terhadap moda transportasi speedboat dan klotok pada penelitian ini. Berikut adalah beberapa kaitan dan relevansi yang dapat diidentifikasi:

1. Undang-Undang Pelayaran mengatur berbagai aspek terkait dengan pelayaran, termasuk persyaratan teknis, keselamatan, perlindungan lingkungan, dan aspek hukum lainnya. Dalam konteks transportasi speedboat dan klotok, regulasi ini dapat menjadi acuan untuk memastikan bahwa operasional kedua moda transportasi tersebut

mematuhi standar keselamatan dan perlindungan lingkungan yang ditetapkan.

2. Undang-Undang tersebut mungkin mengatur persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh kapal, termasuk speedboat dan klotok. Hal ini termasuk aspek seperti kapasitas penumpang, perlengkapan keselamatan, kondisi kapal, dan lain sebagainya. Analisis kebijakan dapat mencakup evaluasi terhadap sejauh mana kedua moda transportasi ini memenuhi persyaratan tersebut.
3. Analisis kebijakan juga dapat mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi layanan transportasi yang disediakan oleh speedboat dan klotok dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di rute Penajam-Balikpapan. Hal ini termasuk aspek aksesibilitas, ketersediaan layanan, harga tiket, waktu perjalanan, dan lain sebagainya.
4. Selain aspek keselamatan, Undang-Undang Pelayaran juga mengatur perlindungan lingkungan laut. Analisis kebijakan dapat mengevaluasi dampak lingkungan dari operasional speedboat dan klotok, serta mengidentifikasi upaya yang perlu dilakukan untuk meminimalkan dampak tersebut sesuai dengan regulasi yang berlaku.
5. Undang-Undang Pelayaran juga dapat mengatur tentang koordinasi antarinstansi terkait, seperti Kementerian Perhubungan, Badan Keamanan Laut, dan pemerintah daerah. Analisis kebijakan dapat melibatkan evaluasi terhadap koordinasi antarinstansi tersebut

dalam mendukung pengelolaan dan pengembangan moda transportasi speedboat dan klotok di rute tersebut.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menjadi landasan hukum dan acuan penting dalam menganalisis kebijakan terhadap moda transportasi speedboat dan klotok di rute Penajam-Balikpapan, terutama dalam keselamatan, perlindungan lingkungan, regulasi teknis, layanan transportasi, dan koordinasi antarinstansi terkait.

4) Dalam Pemaparan Proposal Penataan Dermaga Speed dan Klotok Penajam untuk Kabupaten Penajam Paser Utara.

Proposal penataan Dermaga Speed dan Klotok Penajam yang disampaikan oleh Pj. Bupati Drs. Makmur Marbun, M.Si, untuk Kabupaten Penajam Paser Utara, mencakup serangkaian rencana kegiatan yang terstruktur untuk meningkatkan pelayanan dan infrastruktur di sektor transportasi. Rencana penataan lahan parkir dermaga Speed Penajam pada tahun 2023-2024 menekankan pada pembersihan, pembatasan akses, dan pembuatan lahan parkir yang representatif. Langkah-langkah ini dirancang untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna dermaga, serta mendukung optimalisasi pemanfaatan ruang.

Rencana penataan Speed Penajam dan Klotok untuk tahun 2024-2025 melibatkan penyediaan fasilitas pendukung, peningkatan retribusi, dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rencana ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga memperhatikan aspek layanan dan keamanan, seperti pelayanan langsung oleh Dinas Perhubungan, bantuan Life Jacket,

dan peninggian lantai jembatan penyeberangan akibat pasang air.

Hak atas tanah untuk lahan Dermaga Speed dan Klotok diatur sesuai dengan ketentuan dalam bidang pelayaran, yang melibatkan luas lahan 140m x 30m berdasarkan Segel Tahun 1989. Adanya konsep kearifan lokal dalam rencana revitalisasi dan siteplan menunjukkan keterlibatan masyarakat setempat dalam proses pengembangan.

Rencana sirkulasi kendaraan, ambulance, dan pejalan kaki, serta konsep view, denah, dan siteplan pada tahap revitalisasi, memberikan gambaran keseluruhan yang komprehensif mengenai perubahan tata ruang dan perbaikan infrastruktur. Anggaran biaya yang disusun secara detail, termasuk rencana anggaran tanpa melibatkan parkir, dengan total anggaran sebesar Rp 21,64 milyar dan Rp 13,45 milyar berturut-turut, memberikan gambaran keuangan yang jelas terkait dengan implementasi rencana tersebut.



Gambar 4.1 Rencana Visualisasi Revitalisasi Dermaga Speed Dan Klotok Kabupaten Penajam Paser Utara



Gambar 4.2 Rencana Siteplan Revitalisasi Dermaga Speed Dan Klotok Kabupaten Penajam Paser Utara

Berdasarkan gambar 4.1, tergambar dengan jelas bahwa Rencana Visualisasi Revitalisasi Dermaga Speed Dan Klotok di Kabupaten Penajam Paser Utara membahas secara komprehensif berbagai aspek terkait peningkatan dan pengembangan dermaga. Mulai dari desain fisik dermaga hingga penataan lahan dan akses, serta penyediaan fasilitas pendukung untuk meningkatkan kenyamanan pengguna dermaga. Keamanan dan keselamatan juga menjadi fokus dengan strategi konkret, seperti tindakan pelayanan langsung dan bantuan pelampung. Pendekatan partisipatif melibatkan masyarakat lokal, dan perencanaan sirkulasi kendaraan serta perubahan tata ruang, semuanya diakomodasi dalam rencana ini. Rencana keuangan yang terinci, termasuk aspek hukum dan hak atas tanah, memastikan integritas konsep visual secara keseluruhan. Dengan demikian, pembahasan ini menggambarkan rencana visualisasi sebagai alat pemahaman menyeluruh terhadap implementasi revitalisasi dermaga

dengan dampak positif bagi masyarakat setempat dan pengguna dermaga.

Gambar 4.2 menggambarkan secara rinci rencana siteplan revitalisasi dermaga Speed dan Klotok di Kabupaten Penajam Paser Utara yang mencakup tata letak dan perencanaan spasial proyek pembangunan. Siteplan ini sangat berfokus pada penataan lahan, menentukan lokasi fasilitas utama, merancang rute sirkulasi kendaraan, dan mengintegrasikan proyek dengan infrastruktur sekitar. Prinsip-prinsip utama yang menjadi dasar desain ini mencakup keamanan, efisiensi operasional, dan kenyamanan bagi pengguna dermaga. Selain itu, siteplan ini menitikberatkan pada aspek keberlanjutan dan dampak lingkungan dengan mempertimbangkan penggunaan lahan yang efisien dan menerapkan praktik ramah lingkungan. Dengan mendetailkan setiap elemen dalam siteplan, rencana revitalisasi ini ditujukan untuk menciptakan lingkungan dermaga yang tidak hanya fungsional dan efisien, tetapi juga estetis, serta mendukung kebutuhan masyarakat dan pengguna dermaga secara menyeluruh.

Melalui informasi dari proposal penataan Dermaga Speed dan Klotok Penajam yang diajukan oleh Pj. Bupati Drs. Makmur Marbun, M.Si, untuk Kabupaten Penajam Paser Utara, memiliki dampak positif yang dapat dirasakan oleh masyarakat setempat. Dengan penekanan pada pembersihan, pembatasan akses, dan pembuatan lahan parkir yang representatif pada dermaga Speed Penajam, masyarakat akan merasakan peningkatan kenyamanan dan keamanan dalam menggunakan moda

transportasi tersebut. Rencana penyediaan fasilitas pendukung, peningkatan retribusi, dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2024-2025 juga menjanjikan peningkatan layanan, keamanan, dan efisiensi.

Penerapan konsep kearifan lokal dalam rencana revitalisasi menunjukkan partisipasi masyarakat setempat dalam proses pengembangan, yang dapat meningkatkan rasa memiliki dan keterlibatan komunitas. Rencana sirkulasi kendaraan, ambulance, dan pejalan kaki, bersama dengan konsep view, denah, dan siteplan pada tahap revitalisasi, memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perubahan tata ruang dan perbaikan infrastruktur, yang akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar.

Secara finansial, anggaran biaya yang disusun secara detail dan transparan memberikan gambaran jelas tentang penggunaan dana, dan masyarakat dapat mengamati bahwa dana yang signifikan dialokasikan untuk meningkatkan dermaga Speed dan Klotok. Dengan demikian, masyarakat dapat mengharapkan peningkatan signifikan dalam pelayanan, keamanan, dan efisiensi moda transportasi laut di wilayah mereka. Sehingga, proposal ini dapat dianggap sebagai langkah strategis untuk mendukung pengembangan moda transportasi dan pelayanan di Penajam.

5) Hasil Wawancara Bersama dengan Para Informan

a. Informan atas nama Andy Sunra Satriadi Sumaryo

Informan atas nama **Andy Sunra Satriadi Sumaryo** dengan

Jabatan sebagai Kepala Bidang Prasarana Dinas Perhubungan tanggal 01 Desember 2023 Kabupaten Penajam Paser Utara bahwa:

“Hasil penelitian ini menggambarkan sejumlah aspek terkait moda transportasi speed dan klotok di rute Penajam–Balikpapan. Wawancara dengan Andy Sunra Satriadi Sumaryo, Kepala Bidang Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara, mengungkapkan kendala dalam Regulasi dan Izin Operasional terutama terkait persyaratan teknis dan status lahan eksisting. Pada aspek Infrastruktur dan Fasilitas, kondisi Dermaga Speed membutuhkan perbaikan dengan alokasi anggaran Rp. 15.000.000.000,- untuk revitalisasi pada 2024. Keamanan dan Keselamatan pelayaran masih kurang optimal karena status pelabuhan yang belum jelas. Pengelolaan Lingkungan sulit dilakukan akibat status pelabuhan yang belum jelas, meskipun dampak emisi gas buang dianggap rendah. Koordinasi Pemerintah Lokal terbilang baik, namun belum ada inisiatif kolaboratif untuk meningkatkan konektivitas. Penggunaan Teknologi di masa depan melibatkan partisipasi swasta dengan izin operasional Badan Usaha Pelabuhan. Rencana Pengembangan Masa Depan menunjukkan pelibatan swasta dalam mengelola Pelabuhan Pengumpan Lokal, memandang moda transportasi ini memiliki peran potensial dalam pengembangan ekonomi dan pariwisata daerah, khususnya dengan konsep model Kapal Klotok yang menarik sebagai destinasi wisata lokal”.

Hasil wawancaranya memberikan informasi terkait:

- 1) Hasil penelitian ini menggambarkan sejumlah aspek terkait moda transportasi speed dan klotok di rute Penajam–Balikpapan berdasarkan **wawancara dengan Andy Sunra Satriadi Sumaryo**, Kepala Bidang Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara.
- 2) Dalam hal **Regulasi dan Izin Operasional**, terlihat bahwa izin operasional untuk Pelabuhan speed dan Klotok mengalami kendala, terutama terkait persyaratan teknis yang belum terpenuhi dan status lahan eksisting yang masih milik masyarakat. Status kepemilikan

lahan menjadi salah satu hambatan yang memerlukan upaya ekstra untuk penyelesaiannya.

- 3) Pada aspek **Infrastruktur dan Fasilitas**, kondisi eksisting Dermaga Speed perlu diperbaiki, dan telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 15.000.000.000,- untuk revitalisasi pada tahun 2024. Namun, fasilitas pelabuhan atau dermaga untuk klotok masih belum memadai, dan upaya perbaikan diharapkan dapat memenuhi kriteria persyaratan teknis sebuah Pelabuhan Pengumpan Lokal.
- 4) Dalam konteks **Keamanan dan Keselamatan**, terlihat bahwa monitoring keselamatan dan keamanan pelayaran belum maksimal karena status pelabuhan yang belum jelas operasionalnya. Fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran saat ini dilaksanakan oleh Syahbandar, yaitu Kepala KSOP Kelas I Balikpapan. Aturan kecepatan maksimal sudah ditetapkan sebesar 60 Mil dengan kemampuan daya dorong maksimal speed dan klotok menggunakan mesin 40 PK.
- 5) Aspek **Pengelolaan Lingkungan** menunjukkan bahwa pengelolaan isu-isu lingkungan terkait moda transportasi klotok sulit dilakukan karena status pelabuhan yang belum jelas. Meskipun aturan lingkungan yang jelas terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, kendala Dermaga Speed dan Klotok yang belum memiliki status Pelabuhan Pengumpan Lokal menyulitkan

pengarusutamaan lingkungan. Dampak emisi gas buang dianggap cukup rendah.

- 6) **Koordinasi antara Pemerintah Lokal** terbilang baik, terutama dengan KSOP Kelas I Balikpapan, ditandai dengan seringnya rapat internal terkait fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran. Namun, belum ada inisiatif kolaboratif untuk meningkatkan konektivitas dan efisiensi perjalanan.
- 7) Dalam hal **Penggunaan Teknologi**, pengelolaan moda transportasi speed dan klotok di masa depan akan melibatkan teknologi dan partisipasi swasta yang memiliki izin operasional Badan Usaha Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal. Pemanfaatan teknologi dianggap sebagai kebutuhan mendasar.
- 8) Terakhir, pada aspek **Rencana Pengembangan Masa Depan**, terlihat bahwa rencana pengembangan melibatkan pelibatan swasta untuk mengelola Pelabuhan Pengumpan Lokal. Moda transportasi ini dianggap memiliki peran potensial dalam pengembangan ekonomi dan pariwisata daerah, terutama dengan adopsi konsep model Kapal Klotok yang dapat menjadi daya tarik wisata lokal.

Dengan demikian, kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat sejumlah kendala, terdapat pula upaya dan rencana yang diambil untuk meningkatkan kondisi dan pemanfaatan moda transportasi speed dan klotok di rute Penajam–Balikpapan.

b. Dari hasil wawancara dengan Kahar Mashud, Camat Penajam

Pada tanggal 04 Desember 2023 wawancara dengan Kahar Mashud, Camat Penajam, menyatakan bahwa:

“Regulasi dan izin operasional moda transportasi speed dan klotok di rute Penajam–Balikpapan diatur oleh Dinas Perhubungan, mengikuti peraturan Kementerian Perhubungan. Meskipun operator harus mematuhi persyaratan khusus, infrastruktur moda transportasi speed masih perlu pemetaan lebih lanjut, dan fasilitas pelabuhan atau dermaga klotok masih dalam tahap pemantapan. Dalam aspek keamanan dan keselamatan, pemerintah daerah memberikan sosialisasi keselamatan, tanpa aturan kecepatan tertentu. Penanganan isu lingkungan melibatkan pengingat kepada operator, dan terdapat inisiatif untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar. Koordinasi antara pemerintah daerah Penajam Paser Utara dan Balikpapan intensif dengan kolaborasi kearifan lokal, termasuk dalam prosedur pembelian bahan bakar. Penggunaan teknologi masih manual, dan rencana pengembangan masa depan dalam tahap pembahasan, dengan melihat peran moda transportasi sebagai peluang untuk peningkatan ekonomi dan sektor pariwisata daerah, memerlukan pendalaman tata ruang yang detail sebagai instrumen akses pintu masuk Kabupaten Penajam Paser Utara”.

Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa regulasi dan izin operasional moda transportasi speed dan klotok di rute Penajam–Balikpapan diatur oleh Dinas Perhubungan dengan mengikuti peraturan Kementerian Perhubungan. Meskipun terdapat persyaratan khusus yang harus dipatuhi oleh operator, infrastruktur moda transportasi speed masih membutuhkan pemetaan lebih lanjut, dan fasilitas pelabuhan atau dermaga klotok masih dalam tahap pemantapan.

Dalam aspek keamanan dan keselamatan, pemerintah setempat aktif memberikan sosialisasi untuk keselamatan, namun belum ada aturan kecepatan tertentu. Penanganan isu lingkungan melibatkan pengingat kepada operator dan terdapat inisiatif untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar. Koordinasi antara pemerintah daerah Penajam Paser Utara dan

Balikpapan dilakukan intensif dengan kolaborasi kearifan lokal, termasuk dalam prosedur pembelian bahan bakar. Penggunaan teknologi masih manual, dan rencana pengembangan masa depan sedang dalam tahap pembahasan, dengan melihat peran moda transportasi sebagai peluang untuk peningkatan ekonomi dan sektor pariwisata daerah yang menjanjikan, memerlukan pendalaman tata ruang yang detail sebagai instrumen akses pintu masuk Kabupaten Penajam Paser Utara.

c. Hasil Wawancara Dengan Amiruddin, THL,

Berdasarkan hasil wawancara dengan Amiruddin, THL, pada tanggal 08 Desember 2023, Amiruddin menyatakan:

"Saya tidak memiliki pengetahuan yang cukup terkait dengan sebagian besar pertanyaan terkait regulasi, infrastruktur, keamanan, lingkungan, koordinasi antara pemerintah lokal, penggunaan teknologi, dan rencana pengembangan masa depan moda transportasi speed dan klotok di rute Penajam–Balikpapan. Saya tidak mengetahui izin operasional, persyaratan, kondisi infrastruktur, keamanan, aturan kecepatan, pengelolaan lingkungan, koordinasi pemerintah, penggunaan teknologi, atau rencana pengembangan di masa mendatang." Kesimpulan ini menunjukkan pentingnya meningkatkan kesadaran dan pengetahuan terkait aspek-aspek krusial dalam pengembangan moda transportasi di wilayah tersebut.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa informan tidak memiliki pengetahuan yang cukup terkait dengan sebagian besar pertanyaan terkait regulasi, infrastruktur, keamanan, lingkungan, koordinasi antara pemerintah lokal, penggunaan teknologi, dan rencana pengembangan masa depan moda transportasi speed dan klotok di rute Penajam–Balikpapan. Amiruddin menyatakan tidak mengetahui izin operasional, persyaratan, kondisi infrastruktur, keamanan, aturan

kecepatan, pengelolaan lingkungan, koordinasi pemerintah, penggunaan teknologi, atau rencana pengembangan di masa mendatang. Kesimpulan ini menunjukkan pentingnya meningkatkan kesadaran dan pengetahuan terkait aspek-aspek krusial dalam pengembangan moda transportasi di wilayah tersebut.

d. Wawancara dengan AJ Kuni, seorang Staff Kelurahan Penajam

Berdasarkan wawancara pada tanggal 11 Desember 2023 dengan AJ Kuni, seorang Staff Kelurahan Penajam, AJ Kuni menyatakan:

"Saya memiliki sejumlah keterbatasan informasi terkait regulasi, infrastruktur, keamanan, pengelolaan lingkungan, penggunaan teknologi, dan rencana pengembangan moda transportasi speed dan klotok di rute Penajam–Balikpapan. Saya tidak mengetahui secara detail mengenai izin operasional, persyaratan khusus, kondisi fasilitas, aturan keamanan, penanganan isu lingkungan, penggunaan teknologi, dan rencana pengembangan masa depan. Meskipun terdapat inisiatif kolaboratif dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah Penajam Paser Utara dan Balikpapan, informasi yang terbatas mengenai aspek-aspek kunci tersebut menunjukkan potensi ketidakjelasan dalam pengaturan dan pengembangan moda transportasi di wilayah tersebut."

Terdapat sejumlah keterbatasan informasi terkait regulasi, infrastruktur, keamanan, pengelolaan lingkungan, penggunaan teknologi, dan rencana pengembangan moda transportasi speed dan klotok di rute Penajam–Balikpapan. Informan tidak mengetahui secara detail mengenai izin operasional, persyaratan khusus, kondisi fasilitas, aturan keamanan, penanganan isu lingkungan, penggunaan teknologi, dan rencana pengembangan masa depan. Meskipun terdapat inisiatif kolaboratif dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah Penajam Paser Utara dan Balikpapan, informasi yang terbatas mengenai aspek-aspek kunci tersebut

menunjukkan potensi ketidakjelasan dalam pengaturan dan pengembangan moda transportasi di wilayah tersebut.

e. Wawancara Dengan Juliandra, Seorang Staff Penajam

Berdasarkan wawancara pada tanggal 12 Desember 2023 dengan Juliandra, seorang Staff Penajam, terdapat sejumlah informasi mengenai moda transportasi speed dan klotok di rute Penajam–Balikpapan. Juliandra menjelaskan:

"Dalam regulasi dan izin operasional, pemerintah setempat menangani izin operasional melalui dinas terkait dengan adanya persyaratan khusus seperti jam operasional klotok. Meskipun infrastruktur untuk moda transportasi speed memiliki rencana perbaikan, fasilitas pelabuhan atau dermaga untuk klotok dianggap tidak memadai. Keamanan dan keselamatan penumpang dan kru dijaga secara manual dan melalui himbuan kepada masyarakat, sementara aturan kecepatan untuk moda transportasi speed tidak ada. Pengelolaan lingkungan didukung dengan himbuan penggunaan alat safety, meskipun inisiatif untuk efisiensi bahan bakar tidak diketahui. Koordinasi antara pemerintah daerah Penajam Paser Utara dan Balikpapan terjadi melalui perda yang mengatur, dengan inisiatif kolaboratif terlihat pada kapal ferry yang menjamin keselamatan. Meskipun penggunaan teknologi belum diketahui, ada rencana perbaikan pelabuhan sebagai bagian dari pengembangan masa depan, sementara moda transportasi dianggap sangat menjanjikan untuk pengembangan ekonomi dan pariwisata daerah, tetapi masih perlu dikelola dengan baik oleh pemerintah Penajam Paser Utara."

Dalam regulasi dan izin operasional, pemerintah setempat menangani izin operasional melalui dinas terkait, dengan adanya persyaratan khusus seperti jam operasional klotok. Meskipun infrastruktur untuk moda transportasi speed memiliki rencana perbaikan, fasilitas pelabuhan atau dermaga untuk klotok dianggap tidak memadai. Keamanan dan keselamatan penumpang dan kru dijaga secara manual dan melalui himbuan kepada masyarakat, sementara aturan kecepatan untuk moda

transportasi speed tidak ada. Pengelolaan lingkungan didukung dengan himbauan penggunaan alat safety, meskipun inisiatif untuk efisiensi bahan bakar tidak diketahui.

Koordinasi antara pemerintah daerah Penajam Paser Utara dan Balikpapan terjadi melalui perda yang mengatur, dengan inisiatif kolaboratif terlihat pada kapal ferry yang menjamin keselamatan. Meskipun penggunaan teknologi belum diketahui, ada rencana perbaikan pelabuhan sebagai bagian dari pengembangan masa depan, sementara moda transportasi dianggap sangat menjanjikan untuk pengembangan ekonomi dan pariwisata daerah, tetapi masih perlu dikelola dengan baik oleh pemerintah Penajam Paser Utara.

f. Wawancara dengan Syaifullah Hasan, seorang Staff PPSDA

Berdasarkan hasil wawancara dengan Syaifullah Hasan, seorang Staff PPSDA/Honorer pada tanggal 15 Desember 2023, Syaifullah Hasan menyatakan:

"Moda transportasi di rute Penajam–Balikpapan memiliki regulasi dan izin operasional yang diatur oleh sub bidang angkutan perairan. Namun, saya tidak mengetahui persyaratan khusus atau regulasi yang harus dipatuhi oleh operator moda transportasi. Infrastruktur untuk moda transportasi speed dinilai cukup memadai, dengan keyakinan akan upaya perbaikan dari pemerintah setempat. Fasilitas pelabuhan atau dermaga untuk klotok juga dianggap memadai, dengan adanya usaha untuk peningkatan. Dalam hal keamanan dan keselamatan, pemerintah setempat memberikan dukungan dengan menyediakan safety pelampung dan memberikan arahan sesuai standar keselamatan. Namun, tidak terdapat aturan kecepatan tertentu yang harus diikuti. Pengelolaan lingkungan terkait moda transportasi klotok ditangani langsung oleh dinas perhubungan. Saya tidak mengetahui inisiatif untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar atau membatasi dampak lingkungan moda transportasi speed. Koordinasi antara pemerintah daerah Penajam Paser Utara dan Balikpapan, inisiatif kolaboratif, penggunaan teknologi, dan rencana pengembangan masa

depan masih menjadi informasi yang tidak diketahui oleh saya. Oleh karena itu, diperlukan klarifikasi lebih lanjut untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan jelas terkait aspek-aspek kunci pengelolaan moda transportasi di wilayah tersebut."

Hasil wawancaranya ini dapat disimpulkan bahwa moda transportasi di rute Penajam–Balikpapan memiliki regulasi dan izin operasional yang diatur oleh sub bidang angkutan perairan. Meskipun begitu, informan tidak mengetahui persyaratan khusus atau regulasi yang harus dipatuhi oleh operator moda transportasi. Infrastruktur untuk moda transportasi speed dinilai cukup memadai, dengan keyakinan akan upaya perbaikan dari pemerintah setempat. Fasilitas pelabuhan atau dermaga untuk klotok juga dianggap memadai, dengan adanya usaha untuk peningkatan.

Dalam hal keamanan dan keselamatan, pemerintah setempat memberikan dukungan dengan menyediakan sefty pelampung dan memberikan arahan sesuai standar keselamatan. Namun, tidak terdapat aturan kecepatan tertentu yang harus diikuti. Pengelolaan lingkungan terkait moda transportasi klotok ditangani langsung oleh dinas perhubungan. Informan tidak mengetahui inisiatif untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar atau membatasi dampak lingkungan moda transportasi speed. Koordinasi antara pemerintah daerah Penajam Paser Utara dan Balikpapan, inisiatif kolaboratif, penggunaan teknologi, dan rencana pengembangan masa depan masih menjadi informasi yang tidak diketahui oleh informan. Oleh karena itu, diperlukan klarifikasi lebih lanjut untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan jelas terkait aspek- aspek kunci pengelolaan moda transportasi di wilayah tersebut.

Adapun matriks hasil wawancara Bersama dengan informan terkait kebijakan publik terhadap moda transportasi speed dan klotok di Penajam – Balikpapan dan langkah-langkah yang diambil pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan transportasi laut di Penajam–Balikpapan, diuraikan sebagai beriku:

Tabel 4.3 Matriks Jawaban Informan Hasil Wawancara

Informan	Jawaban
<p>Informan 1 Andy Sunra Satriadi Sumaryo dengan Jabatan sebagai Kepala Bidang Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara 01 Desember 2023</p>	<p>Analisis Kebijakan Publik Terhadap Moda Transportasi Speed dan Klotok di Penajam – Balikpapan: Dari hasil wawancara, kebijakan publik terhadap moda transportasi di Penajam–Balikpapan mencakup regulasi dan izin operasional diatur oleh sub bidang angkutan perairan. Infrastruktur moda transportasi speed dianggap memadai, dengan optimisme perbaikan dari pemerintah. Fasilitas pelabuhan untuk klotok dinilai memadai, namun, inisiatif untuk meningkatkannya telah dimulai. Keamanan dan keselamatan mendapat dukungan, meskipun tidak ada aturan kecepatan spesifik. Pengelolaan lingkungan moda transportasi klotok ditangani oleh dinas perhubungan, tetapi belum ada inisiatif terukur untuk efisiensi bahan bakar atau mengurangi dampak lingkungan moda transportasi speed. Koordinasi antar pemerintah daerah Penajam Paser Utara dan Balikpapan, inisiatif kolaboratif, pemanfaatan teknologi, dan rencana pengembangan masa depan masih memerlukan klarifikasi untuk gambaran yang lebih lengkap.</p> <p>Langkah-langkah Pemerintah Daerah untuk Meningkatkan Pelayanan Transportasi Laut: Berdasarkan hasil wawancara, langkah-langkah pemerintah daerah di Penajam–Balikpapan untuk meningkatkan pelayanan transportasi laut melibatkan pemerhatian terhadap kejelasan persyaratan dan regulasi moda transportasi. Dukungan terus diberikan pada upaya perbaikan infrastruktur moda transportasi speed dan fasilitas pelabuhan atau dermaga untuk klotok. Langkah-langkah lain mencakup penetapan aturan kecepatan spesifik, inisiatif konkret untuk efisiensi bahan bakar dan pengurangan dampak lingkungan moda transportasi speed. Diperlukan pula langkah-langkah konkret untuk meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah Penajam Paser Utara dan Balikpapan, mendorong inisiatif kolaboratif, memanfaatkan teknologi terbaru, serta merencanakan pengembangan masa depan yang berkelanjutan.</p>
<p>Informan 2 Kahar Mashud, Camat Penajam Kabupaten</p>	<p>Analisis Kebijakan Publik Terhadap Moda Transportasi Speed dan Klotok di Penajam – Balikpapan: Regulasi dan izin operasional moda transportasi speed dan klotok di rute Penajam–Balikpapan diatur oleh Dinas Perhubungan,</p>

<p>Penajam Paser Utara 04 Desember 2023</p>	<p><i>mengikuti peraturan Kementerian Perhubungan. Meskipun operator harus mematuhi persyaratan khusus, infrastruktur moda transportasi speed masih perlu pemetaan lebih lanjut, dan fasilitas pelabuhan atau dermaga klotok masih dalam tahap pemantapan. Dalam aspek keamanan dan keselamatan, pemerintah daerah memberikan sosialisasi keselamatan, tanpa aturan kecepatan tertentu. Penanganan isu lingkungan melibatkan pengingat kepada operator, dan terdapat inisiatif untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar.</i></p> <p>Langkah-langkah Pemerintah Daerah untuk Meningkatkan Pelayanan Transportasi Laut: Koordinasi antara pemerintah daerah Penajam Paser Utara dan Balikpapan intensif dengan kolaborasi kearifan lokal, termasuk dalam prosedur pembelian bahan bakar. Penggunaan teknologi masih manual, dan rencana pengembangan masa depan dalam tahap pembahasan, dengan melihat peran moda transportasi sebagai peluang untuk peningkatan ekonomi dan sektor pariwisata daerah, memerlukan pendalaman tata ruang yang detail sebagai instrumen akses pintu masuk Kabupaten Penajam Paser Utara.</p>
<p>Informan 3 Amiruddin, THL Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara 08 Desember 2023</p>	<p>Analisis Kebijakan Publik Terhadap Moda Transportasi Speed dan Klotok di Penajam – Balikpapan: "Saya tidak memiliki pengetahuan yang cukup terkait dengan sebagian besar pertanyaan terkait regulasi, infrastruktur, keamanan, lingkungan, koordinasi antara pemerintah lokal, penggunaan teknologi, dan rencana pengembangan masa depan moda transportasi speed dan klotok di rute Penajam–Balikpapan. Saya tidak mengetahui izin operasional, persyaratan, kondisi infrastruktur, keamanan, aturan kecepatan, pengelolaan lingkungan, koordinasi pemerintah, penggunaan teknologi, atau rencana pengembangan di masa mendatang."</p> <p>Langkah-langkah Pemerintah Daerah untuk Meningkatkan Pelayanan Transportasi Laut: "Kesimpulan ini menunjukkan pentingnya meningkatkan kesadaran dan pengetahuan terkait aspek-aspek krusial dalam pengembangan moda transportasi di Kabupaten Penajam Paser Utara."</p>
<p>Informan 4 AJ Kuni, Staff Kelurahan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara 11 Desember 2023</p>	<p>Analisis Kebijakan Publik Terhadap Moda Transportasi Speed dan Klotok di Penajam – Balikpapan: "Saya memiliki sejumlah keterbatasan informasi terkait regulasi, infrastruktur, keamanan, pengelolaan lingkungan, penggunaan teknologi, dan rencana pengembangan moda transportasi speed dan klotok di rute Penajam–Balikpapan. Saya tidak mengetahui secara detail mengenai izin operasional, persyaratan khusus, kondisi fasilitas, aturan keamanan, penanganan isu lingkungan, penggunaan teknologi, dan rencana pengembangan masa depan."</p> <p>Langkah-langkah Pemerintah Daerah untuk Meningkatkan Pelayanan Transportasi Laut: "Meskipun</p>

	<p>terdapat inisiatif kolaboratif dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah Penajam Paser Utara dan Balikpapan, informasi yang terbatas mengenai aspek-aspek kunci tersebut menunjukkan potensi ketidakjelasan dalam pengaturan dan pengembangan moda transportasi di w Kabupaten Penajam Paser Utara."</p>
<p>Informan 5 Juliandra, seorang Staff Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara 12 Desember 2023</p>	<p>Analisis Kebijakan Publik Terhadap Moda Transportasi Speed dan Klotok di Penajam – Balikpapan: Dalam regulasi dan izin operasional, pemerintah setempat menangani izin operasional melalui dinas terkait dengan adanya persyaratan khusus seperti jam operasional klotok. Meskipun infrastruktur untuk moda transportasi speed memiliki rencana perbaikan, fasilitas pelabuhan atau dermaga untuk klotok dianggap tidak memadai. Keamanan dan keselamatan penumpang dan kru dijaga secara manual dan melalui himbauan kepada masyarakat, sementara aturan kecepatan untuk moda transportasi speed tidak ada. Pengelolaan lingkungan didukung dengan himbauan penggunaan alat safety, meskipun inisiatif untuk efisiensi bahan bakar tidak diketahui.</p> <p>Langkah-langkah Pemerintah Daerah untuk Meningkatkan Pelayanan Transportasi Laut: Koordinasi antara pemerintah daerah Penajam Paser Utara dan Balikpapan terjadi melalui perda yang mengatur, dengan inisiatif kolaboratif terlihat pada kapal ferry yang menjamin keselamatan. Meskipun penggunaan teknologi belum diketahui, ada rencana perbaikan pelabuhan sebagai bagian dari pengembangan masa depan, sementara moda transportasi dianggap sangat menjanjikan untuk pengembangan ekonomi dan pariwisata daerah, tetapi masih perlu dikelola dengan baik oleh pemerintah Penajam Paser Utara.</p>
<p>Informan 6 Syaifullah Hasan, seorang Staff PPSDA/Honorer Kabupaten Penajam Paser Utara 15 Desember 2023</p>	<p>Analisis Kebijakan Publik Terhadap Moda Transportasi Speed dan Klotok di Penajam – Balikpapan: Moda transportasi di rute Penajam–Balikpapan diatur oleh regulasi dan izin operasional dari sub bidang angkutan perairan. Meskipun infrastruktur untuk moda transportasi speed dinilai cukup memadai, kurangnya informasi mengenai persyaratan khusus atau regulasi yang harus dipatuhi oleh operator menjadi ketidakpastian. Fasilitas pelabuhan atau dermaga untuk klotok dianggap memadai, dengan usaha untuk peningkatan. Keamanan dan keselamatan mendapat dukungan dari pemerintah setempat dengan menyediakan safety pelampung dan memberikan arahan sesuai standar keselamatan. Namun, tidak ada aturan kecepatan spesifik yang harus diikuti. Pengelolaan lingkungan moda transportasi klotok ditangani langsung oleh dinas perhubungan, sementara inisiatif untuk efisiensi bahan bakar atau membatasi dampak lingkungan moda transportasi speed tidak diketahui. Koordinasi antara pemerintah daerah Penajam Paser Utara dan Balikpapan, inisiatif kolaboratif, penggunaan teknologi, dan rencana pengembangan masa depan masih</p>

	<p>memerlukan klarifikasi lebih lanjut untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan jelas terkait aspek-aspek kunci pengelolaan moda transportasi di Kabupaten Penajam Paser Utara.</p> <p>Langkah-langkah Pemerintah Daerah untuk Meningkatkan Pelayanan Transportasi Laut: Langkah-langkah pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan transportasi laut melibatkan klarifikasi lebih lanjut terkait regulasi dan persyaratan khusus moda transportasi. Selain itu, upaya peningkatan infrastruktur, keamanan, dan keselamatan moda transportasi speed dan klotok perlu ditingkatkan dengan memastikan adanya aturan kecepatan yang jelas. Inisiatif untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar dan membatasi dampak lingkungan moda transportasi speed juga perlu diperhatikan. Koordinasi antar pemerintah daerah, penerapan teknologi, dan perencanaan pengembangan masa depan harus menjadi fokus untuk mengoptimalkan pelayanan transportasi laut di Kabupaten Penajam Paser Utara.</p>
--	---

Sumber: Hasil Wawancara Responden

g. Dokumentasi terkait pengembangan pelabuhan klotok dan speed di Penajam Paser Utara



Gambar 4.3. Rapat terkait pengembangan pelabuhan klotok dan speed di Penajam Paser Utara

Berdasarkan dokumentasi pada gambar 4.3 pembahasan dalam rapat bersama antara Pejabat Pengganti Bupati (PJ Bupati), Kepala Dinas

Perhubungan (Kadishub), dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kadis PUPR) terkait pengembangan pelabuhan klotok dan speed di Penajam Paser Utara, pembahasan melibatkan evaluasi proyek, pemantauan anggaran, perencanaan infrastruktur, upaya keamanan dan keselamatan, serta strategi pengembangan masa depan.

Dalam upaya mengembangkan Pelabuhan Klotok dan Speed di Penajam Paser Utara, pemerintah telah menunjukkan perhatian serius dengan mengalokasikan anggaran pembangunan yang substansial. Alokasi anggaran ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk mendukung proyek tersebut, memastikan bahwa pelabuhan ini dapat berkembang secara optimal. Perjanjian terkait hak atas lahan, yang sebelumnya telah disepakati antara pemerintah dan pemilik lahan (masyarakat), menjadi fondasi kerjasama. Melalui kesepakatan ini, kedua belah pihak sepakat untuk bekerja sama dalam pemanfaatan pelabuhan, menciptakan dasar yang kokoh untuk pengelolaan bersama yang saling menguntungkan.

Anggaran pembangunan yang telah dialokasikan pemerintah tidak hanya mencakup infrastruktur Pelabuhan Speed dan Klotok, tetapi juga mendukung berbagai aspek proyek, seperti pengembangan fasilitas dan peningkatan kualitas layanan. Tujuannya tidak hanya terbatas pada kecepatan operasional (speed), tetapi juga pada efisiensi dan keberlanjutan. Dalam perjanjian tersebut, terdapat kewajiban dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing pihak. Pemerintah bertanggung

jawab menyediakan anggaran dan fasilitas yang diperlukan, sementara pemilik lahan diwajibkan untuk mematuhi peraturan dan berkontribusi dalam pengelolaan pelabuhan.

Perjanjian atau kesepakatan, pemerintah dan masyarakat sebagai pemilik lahan menyampaikan komitmen antara kedua belah pihak untuk menjaga dan memajukan Pelabuhan Klotok dan Speed Penajam. Kesepakatan ini bukan hanya tentang pengembangan infrastruktur, tetapi juga tentang pembangunan berkelanjutan dan inklusif yang melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak terkait. Harapannya, pelabuhan ini akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi seluruh komunitas.

Sehingga fokus pada realisasi proyek tersebut di tahun 2024 menjadi harapan bersama. Kesenambungan komunikasi dan kerja sama antarinstansi diharapkan mendorong progres positif, memastikan keberlanjutan proyek, dan mencapai tujuan pengembangan pelabuhan klotok dan speedboat dengan efektif. Sehingga kolaborasi ini diharapkan membawa hasil yang memuaskan dan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan pariwisata daerah.

C. Pembahasan

a. Analisis kebijakan publik terhadap moda transportasi Speed dan Klotok di Penajam – Balikpapan

Analisis kebijakan publik terhadap moda transportasi Speed dan Klotok di Penajam – Balikpapan menekankan pentingnya koordinasi,

teknologi, dan perencanaan yang cermat dalam menghadapi tantangan utama seperti regulasi, izin operasional, infrastruktur, keamanan, dan lingkungan. Berdasarkan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 31 Tahun 2017, ditemukan bahwa peran sentral Kepala Dinas Perhubungan dan koordinasi antar-seksi menjadi fokus utama dalam memastikan keterpaduan kebijakan. Evaluasi pelaksanaan tugas dan optimalisasi kinerja sektor-sektor terkait juga menjadi bagian penting dalam analisis kebijakan tersebut. Berdasarkan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 31 Tahun 2017, dapat diidentifikasi beberapa aspek kunci:

- a) Pertama, peran sentral Kepala Dinas Perhubungan sebagai pemimpin, perumus kebijakan, dan pengelola program-program menyeluruh. Keterlibatan Kepala Seksi Angkutan Perairan, Kepala Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana, serta Kepala Seksi Pemaduan Moda Dan Teknologi Perhubungan penting untuk koordinasi dan implementasi kebijakan.
- b) Kedua, pentingnya koordinasi antar-seksi, seperti Angkutan Perairan, Perencanaan dan Pembangunan Prasarana, dan Pemaduan Moda Dan Teknologi Perhubungan, untuk memastikan keterpaduan dan keserasian kebijakan terkait moda transportasi.
- c) Ketiga, fokus pada evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas sebagai kewajiban, penting untuk menganalisis dampak kebijakan terhadap moda transportasi di daerah tersebut.

d) Keempat, optimalisasi kinerja di sektor masing-masing, seperti Perencanaan dan Pembangunan Prasarana serta Pemaduan Moda Dan Teknologi Perhubungan, relevan untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas moda transportasi yang digunakan.

Secara keseluruhan, regulasi ini memberikan kerangka kerja yang relevan untuk menganalisis dan mengevaluasi dampak kebijakan publik terhadap sistem transportasi di Penajam – Balikpapan, dengan fokus pada pengelolaan kebijakan, koordinasi antar-seksi, evaluasi pelaksanaan, dan optimalisasi kinerja.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran juga memiliki peran yang sangat relevan dalam mengatur dan menjamin aspek keselamatan, perlindungan lingkungan, regulasi teknis, layanan transportasi, dan koordinasi antarinstansi terkait terhadap moda transportasi speedboat dan klotok di rute Penajam-Balikpapan. Dengan demikian, Undang-Undang tersebut menjadi landasan hukum yang penting dalam merumuskan kebijakan publik yang efektif dan berkelanjutan terkait dengan kedua moda transportasi tersebut.

Dalam kaitannya dengan penelitian terdahulu, beberapa temuan sejalan dengan hasil penelitian tersebut. Sebagai contoh, penelitian oleh Nampira, Jainuri, & Yumitro (2022) yang membahas kebijakan pembangunan transportasi di daerah perbatasan memiliki persamaan dengan regulasi Penajam–Balikpapan, namun dengan fokus yang berbeda. Begitu pula, penelitian Kadarisman, Suharto, & Majid (2016) tentang

formulasi kebijakan sistem transportasi laut sejalan dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam regulasi tersebut. Manurung (2019) menemukan pilar-pilar utama pengembangan transportasi laut, yang relevan dengan keberlanjutan moda transportasi.

Melalui hasil wawancara dengan para informan memberikan gambaran lengkap dan kompleks terkait dengan kebijakan publik terhadap moda transportasi Speed dan Klotok di rute Penajam–Balikpapan. Berikut adalah kesimpulan yang dapat diambil dari hasil wawancara tersebut:

1) Tantangan Regulasi dan Izin Operasional

Kendala terkait izin operasional, terutama terkait persyaratan teknis dan status kepemilikan lahan eksisting, menjadi hambatan utama yang memerlukan upaya ekstra untuk penyelesaiannya.

2) Infrastruktur dan Fasilitas

Wawancara mencerminkan kebutuhan pemetaan lebih lanjut terkait infrastruktur moda transportasi Speed, dengan alokasi anggaran revitalisasi Dermaga Speed dan Fasilitas pelabuhan atau dermaga untuk klotok masih memerlukan perbaikan agar memenuhi kriteria persyaratan teknis Pelabuhan Pengumpan Lokal.

3) Keamanan dan Keselamatan

Monitoring keselamatan dan keamanan pelayaran masih belum maksimal, terutama karena status operasional pelabuhan yang belum jelas dan aturan kecepatan sudah ditetapkan, namun perlu peningkatan implementasi untuk memastikan keamanan.

4) **Pengelolaan Lingkungan**

Pengelolaan isu-isu lingkungan terkait moda transportasi klotok sulit dilakukan karena status pelabuhan yang belum jelas dan dampak emisi gas buang dianggap rendah, namun perlu pembenahan terutama dalam konteks pengarusutamaan lingkungan.

5) **Koordinasi dan Kolaborasi**

Koordinasi antara pemerintah lokal dan KSOP Balikpapan terbilang baik, tetapi belum ada inisiatif kolaboratif yang cukup untuk meningkatkan konektivitas dan efisiensi perjalanan.

6) **Penggunaan Teknologi**

Masa depan moda transportasi memerlukan keterlibatan teknologi dan partisipasi swasta dengan izin operasional Badan Usaha Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal.

7) **Rencana Pengembangan Masa Depan**

Rencana pengembangan melibatkan pelibatan swasta, terutama untuk mengelola Pelabuhan Pengumpan Lokal dan Moda transportasi dianggap memiliki peran potensial dalam pengembangan ekonomi dan pariwisata daerah, terutama dengan adopsi konsep model Kapal Klotok.

8) **Kesadaran dan Pengetahuan Masyarakat**

Terdapat variasi dalam tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait aspek-aspek krusial dalam pengembangan moda

transportasi, menunjukkan pentingnya edukasi dan informasi lebih lanjut.

Secara keseluruhan, wawancara menggambarkan kompleksitas dalam mengelola moda transportasi di wilayah tersebut, dengan tantangan yang melibatkan regulasi, infrastruktur, keamanan, lingkungan, koordinasi, teknologi, dan rencana pengembangan masa depan. Upaya terkoordinasi dari pemerintah dan pihak terkait diperlukan untuk mengatasi kendala tersebut dan meningkatkan kondisi serta pemanfaatan moda transportasi di rute Penajam–Balikpapan.

Penelitian terdahulu juga memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman aspek-aspek kebijakan transportasi laut. Studi oleh Nampira, Jainuri, & Yumitro (2022) membahas kebijakan pembangunan transportasi di daerah perbatasan dengan fokus pada inovasi dan konektivitas. Sebaliknya, Kadarisman, Suharto, & Majid (2016) mengulas formulasi kebijakan sistem transportasi laut, dengan penekanan pada peningkatan peran armada pelayaran nasional. Manurung (2019) mengidentifikasi pilar-pilar utama pengembangan transportasi laut berdasarkan tren global dan industri maritim.

Studi oleh Cahyandi (2020) juga membahas peran penting transportasi laut dalam mendukung sirkulasi barang dan orang di kecamatan tertentu, sementara Akhyary, Bekti, Sinaga, & Buchori (2019) menganalisis sumber daya dalam implementasi kebijakan transportasi laut di wilayah perbatasan Provinsi Kepulauan Riau. Melalui perbandingan dan

analisis terhadap temuan-temuan ini, sehingga diperoleh wawasan yang lebih komprehensif mengenai kebijakan publik terhadap moda transportasi laut.

Dampak sosial-ekonomi dari moda transportasi speed dan klotok di rute Penajam–Balikpapan memiliki dimensi yang signifikan terhadap perkembangan wilayah tersebut. Dua aspek utama yang perlu diperhatikan dalam analisis ini melibatkan pemantauan dampak pertumbuhan ekonomi lokal dan evaluasi perubahan dalam pola pekerjaan serta pendapatan penduduk terkait dengan adopsi moda transportasi ini.

Peningkatan mobilitas masyarakat, didorong oleh efisiensi dan aksesibilitas moda transportasi speed dan klotok, memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Dari hasil wawancara, terlihat bahwa moda transportasi ini mendorong kedatangan penduduk baru, pelaku usaha, dan pejabat pemerintahan ke daerah tersebut. Hal ini membuka peluang baru dalam sektor ekonomi seperti perdagangan, jasa, dan industri. Distribusi manfaat dari pertumbuhan ekonomi tersebut perlu diperhatikan agar tidak terjadi disparitas di antara masyarakat setempat. Pemantauan yang berkelanjutan terhadap dampak pertumbuhan ekonomi, termasuk indikator seperti peningkatan lapangan kerja dan perkembangan sektor usaha lokal, dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kontribusi positif moda transportasi ini terhadap wilayah tersebut.

Aktivitas ekonomi yang meningkat dapat berdampak pada perubahan dalam pola pekerjaan masyarakat. Adopsi moda transportasi

speed dan klotok dapat menciptakan peluang pekerjaan baru, baik langsung di sektor transportasi maupun tidak langsung di sektor-sektor terkait, seperti pariwisata dan layanan pendukung. Evaluasi terhadap perubahan dalam pola pekerjaan perlu mencakup pemahaman tentang jenis pekerjaan yang muncul, keterlibatan masyarakat setempat dalam sektor-sektor tersebut, dan dampaknya pada pendapatan penduduk. Dengan meningkatnya konektivitas, masyarakat setempat juga dapat terlibat lebih aktif dalam sektor pariwisata, membuka peluang untuk pendapatan tambahan.

Oleh karena itu, secara keseluruhan pemantauan secara berkelanjutan terhadap dampak sosial-ekonomi moda transportasi speed dan klotok sangat penting untuk memahami kontribusinya terhadap pembangunan wilayah. Pemahaman yang mendalam tentang perubahan ekonomi lokal, distribusi manfaat, perubahan dalam struktur pekerjaan, dan dampaknya pada pendapatan masyarakat dapat menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan yang mendukung perkembangan wilayah secara inklusif dan berkelanjutan.

b. Langkah-langkah yang diambil pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan transportasi laut.

Dalam upaya mengembangkan Pelabuhan Klotok dan Speed di Penajam Paser Utara, pemerintah telah menunjukkan perhatian serius dengan mengalokasikan anggaran pembangunan yang substansial. Alokasi anggaran ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk

mendukung proyek tersebut, memastikan bahwa pelabuhan ini dapat berkembang secara optimal. Perjanjian terkait hak atas lahan, yang sebelumnya telah disepakati antara pemerintah dan pemilik lahan (masyarakat), menjadi fondasi kerjasama. Melalui kesepakatan ini, kedua belah pihak sepakat untuk bekerja sama dalam pemanfaatan pelabuhan, menciptakan dasar yang kokoh untuk pengelolaan bersama yang saling menguntungkan.

Anggaran pembangunan yang telah dialokasikan pemerintah tidak hanya mencakup infrastruktur Pelabuhan Speed dan Klotok, tetapi juga mendukung berbagai aspek proyek, seperti pengembangan fasilitas dan peningkatan kualitas layanan. Tujuannya tidak hanya terbatas pada kecepatan operasional (speed), tetapi juga pada efisiensi dan keberlanjutan. Dalam perjanjian tersebut, terdapat kewajiban dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing pihak. Pemerintah bertanggung jawab menyediakan anggaran dan fasilitas yang diperlukan, sementara pemilik lahan diwajibkan untuk mematuhi peraturan dan berkontribusi dalam pengelolaan pelabuhan.

Perjanjian atau kesepakatan, pemerintah dan masyarakat sebagai pemilik lahan menyampaikan komitmen antara kedua belah pihak untuk menjaga dan memajukan Pelabuhan Klotok dan Speed Penajam. Kesepakatan ini bukan hanya tentang pengembangan infrastruktur, tetapi juga tentang pembangunan berkelanjutan dan inklusif yang melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak terkait. Harapannya, pelabuhan ini akan

menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi seluruh komunitas.

Rencana visualisasi revitalisasi dermaga di Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi sebuah komponen Langkah-langka strategis yang mendukung pemahaman dan implementasi kebijakan publik terkait moda transportasi laut di wilayah tersebut. Desain fisik dermaga yang ditingkatkan, penataan lahan dan akses yang lebih efisien, serta fasilitas pendukung yang meningkatkan kenyamanan, semuanya berkontribusi pada peningkatan pelayanan transportasi laut. Aspek keamanan dan keselamatan yang diintegrasikan dalam rencana visualisasi mencerminkan komitmen terhadap keselamatan pengguna, sejalan dengan upaya Dinas Perhubungan. Strategi peningkatan retribusi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan landasan keuangan yang solid untuk mendukung keberlanjutan operasional dermaga. Partisipasi masyarakat lokal dan perubahan tata ruang menggambarkan inklusivitas kebijakan yang mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi lokal.

Berdasarkan hasil penelitian oleh Nampira, Jainuri, & Yumitro (2022) mengenai Kebijakan Pemerintah dalam Pembangunan Transportasi di Daerah Perbatasan menyoroti perlunya inovasi dalam memperoleh dana dari pihak swasta, sebuah tema yang relevan dengan strategi keuangan dalam rencana dermaga di Penajam. Meskipun fokus dan lokasi penelitian berbeda, persamaan dalam pendekatan kualitatif dan pembahasan mengenai kebijakan transportasi laut dapat diidentifikasi.

Demikian pula, penelitian Kadarisman, Suharto, & Majid (2016) tentang Formulasi Kebijakan Sistem Transportasi Laut menunjukkan persamaan dalam pembahasan kebijakan transportasi laut, meskipun konteksnya berbeda dengan Penajam. Begitu juga dengan penelitian lainnya, seperti Manurung (2019) yang membahas Kebijakan dan Strategi Pengembangan Transportasi Laut di Indonesia dengan fokus pada studi kasus dan analisis literatur. Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan oleh Paramita (2024) dan Kadarisman et al. (2016), sejumlah rekomendasi dapat diajukan untuk memberikan panduan terhadap langkah-langkah yang mungkin diambil oleh pemerintah daerah, contohnya Pemerintah Daerah Balikpapan, guna meningkatkan pelayanan transportasi laut.

Rekomendasi berdasarkan Penelitian Paramita (2024) menyoroti pentingnya memperhatikan berbagai aspek pelaksanaan Public Service Obligation (PSO) dalam penyediaan layanan transportasi. Disarankan agar pemerintah daerah tidak hanya memfokuskan perhatian pada aspek ekonomi PSO, tetapi juga mempertimbangkan tujuan lainnya, seperti memberikan transportasi yang terjangkau kepada penduduk berpenghasilan rendah. Selain itu, perlu diupayakan keselarasan dalam penerapan teknologi PSO guna meningkatkan efisiensi, keandalan, dan keamanan layanan transportasi di Indonesia.

Kadarisman et al. (2016) memberikan panduan khusus terkait transportasi laut. Pemerintah daerah dapat mempertimbangkan penerapan azas cabotage sebagai langkah meningkatkan peran armada pelayaran

nasional, baik dalam angkutan barang dalam negeri maupun ekspor-impor. Langkah-langkah lain termasuk mendorong peningkatan koordinasi di pelabuhan guna mengurangi pungutan tidak resmi, memperkuat mekanisme pengawasan untuk memastikan implementasi standar internasional seperti International Ship and Port Security, serta merestrukturisasi peraturan perundangan dan kelembagaan di subsektor transportasi laut. Pentingnya investasi dalam infrastruktur terkait transportasi laut juga diangkat sebagai rekomendasi. Pemerintah daerah dapat berinvestasi dalam pengembangan pelabuhan dan jalur pelayaran meningkatkan kelancaran arus barang dan manusia di daerah tersebut.

Penelitian oleh Cahyandi (2020) tentang Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Eksistensi Transportasi Laut di Kecamatan Kampung Laut Kabupaten Cilacap membahas peran transportasi laut dalam mendukung arus barang dan orang, meskipun dengan konteks yang berbeda. Analogi ini dapat ditemukan dalam rencana dermaga di Penajam, yang juga berupaya meningkatkan moda transportasi laut.

Melalui implementasi rencana visualisasi tersebut, diharapkan kebijakan publik dapat memperbaiki dan meningkatkan moda transportasi Speed dan Klotok di Penajam sesuai dengan tujuan penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang disampaikan, maka kesimpulan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Analisis kebijakan publik terhadap moda transportasi Speed dan Klotok di Penajam–Balikpapan menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah dan pemangku kepentingan dalam pengembangan infrastruktur transportasi tersebut. Ditemukan bahwa regulasi, izin operasional, infrastruktur, keamanan, dan lingkungan menjadi tantangan utama yang harus dihadapi. Namun, dengan fokus pada koordinasi yang efektif, pemanfaatan teknologi, serta perencanaan yang cermat, tantangan tersebut dapat diatasi untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui kesepakatan bersama antara pemerintah dan pemilik lahan, didorong oleh komitmen untuk menjaga dan memajukan pelabuhan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, moda transportasi Speed dan Klotok diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kemajuan wilayah ini secara menyeluruh.
2. Pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pelayanan transportasi laut dengan merencanakan revitalisasi dermaga. Rencana tersebut mencakup desain fisik dermaga yang ditingkatkan, penataan lahan, dan

akses yang lebih efisien, serta fasilitas pendukung untuk meningkatkan kenyamanan pengguna. Aspek keamanan dan keselamatan diintegrasikan dalam rencana visualisasi, sejalan dengan komitmen Dinas Perhubungan. Langkah ini juga melibatkan strategi peningkatan retribusi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai landasan keuangan yang solid. Dengan melibatkan partisipasi masyarakat lokal dan perubahan tata ruang, langkah-langkah ini mencerminkan inklusivitas kebijakan yang memperhatikan kebutuhan dan aspirasi lokal.

B. Saran

Adapun saran penelitian ini:

1. Penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada evaluasi implementasi kebijakan publik terhadap moda transportasi Speed dan Klotok di Penajam–Balikpapan. Analisis dapat mencakup efektivitas regulasi, perizinan operasional, infrastruktur, keamanan, dan perlindungan lingkungan dalam konteks pelaksanaan kebijakan di lapangan.
2. Penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada peran teknologi dalam pengembangan transportasi laut, khususnya terkait dengan revitalisasi dermaga di Kabupaten Penajam Paser Utara. Analisis dapat mencakup penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional, keamanan, dan pelayanan transportasi laut.
3. Studi Dampak Sosial-Ekonomi Revitalisasi Dermaga: Penelitian ini dapat mengkaji dampak sosial-ekonomi dari revitalisasi dermaga yang

direncanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. Analisis dapat meliputi evaluasi dampak terhadap pelayanan transportasi laut, keterlibatan masyarakat lokal, peningkatan PAD, dan perubahan tata ruang wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhyary, E., Bekti, H., Sinaga, O., & Buchori, A. (2019). Analisis Sumber Daya Dalam Implementasi Kebijakan Transportasi Laut Wilayah Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau, 7, 12–29.
- Akib, H. (2020). Implementasi Kebijakan : Apa, mengapa Bagimana. *Jurnal Adminstrasi Publik*, 1(1), 1–100. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/97794-ID-implementasi-kebijakan-apa-mengapa-dan-b.pdf>
- Anderson, J. (2003). *Public Policy Making: An Introduction Fifth Edition*. Boston: Houghton Mifflin Company.
- Arsyad, R. (2020). Analisa Kebijakan Pelayanan Adm kependudukan dan Catatan Sipil Diera Covid-19 di Kota Bandung, 10–24.
- Badan Kebijakan Transportasi, K. P. (2023). Skema Strategi Pengembangan Jaringan Prasarana dan Jaringan Pelayanan Angkutan Transportasi Sungai dalam Rangka Mendukung Kelancaran Mobilitas di Wilayah 3TP. Retrieved from <https://baketrans.dephub.go.id/berita/skema-strategi-pengembangan-jaringan-prasarana-dan-jaringan-pelayanan-angkutan-transportasi-sungai-dalam-rangka-mendukung-kelancaran-mobilitas-di-wilayah-3tp>
- Cahyandi, K. (2020). Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Eksistensi Transportasi Laut Guna Meningkatkan Kelancaran Sirkulasi Barang dan Orang di Kecamatan Kampung Laut Kabupaten Cilacap, 1(1), 123–127.
- Dye, T. R. (2005). *Understanding Public Policy, Eleventh Edition*. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Fabiana, M. F. (2019). Transportasi Laut, 10–28.
- Hadna, A. H. (2018). Peran Dan Posisi Analis Kebijakan Publik. *Universitas Gadjah Mada*, 1–21. Retrieved from https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwizqqGV6K_4AhX-UWwGHa8-DcEQFnoECCQQAQ&url=https%3A%2F%2Fweborganisasi.jogjakota.go.id%2Fassets%2Finstansi%2Fweborganisasi%2Ffiles%2Fmateri-fgd-mekanisme-kerja--utilisasi-analis-kebij
- Handoyo, E. (2018). Kebijakan Publik. In Mustrose (Ed.) (Pertama, pp. 1–339). Semarang: Widya Karya. Retrieved from https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/64319504/Kebijakan_Publik_by_Eko_Handoyo_%28z-lib.org%29-libre.pdf?1598892841=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DKebijakan_Publik_by_Eko_Handoyo_z_lib_or.pdf&Expires=1689769270&Signature=PsNj-SCzjMcCz-
- Herdiana. (2018). Sosialisasi kebijakan publik: pengertian dan konsep dasar. *Stiacimahi.Ac.Id*, 13–25. Retrieved from <http://www.stiacimahi.ac.id/wp-content/uploads/2019/12/2.-Dian-Herdiana.pdf>

- Isabela, M. A. C. (2022). Kebijakan Publik: Ciri, Unsur, dan Jenis. *Kompas.Com*. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/16/02000021/kebijakan-publik--ciri-unsur-dan-jenis>
- Islamy, I. (2014). Definisi dan Makna Kebijakan Publik. *ADPU4410/Modul 1*, 1–41.
- Iswarah, Andi. Idris, Adam. Hasanah, N. (2018). Implementasi Kebijakan Transportasi Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Di Kota Samarinda (Studi Kasus Pada Angkutan Kota Di Kota Samarinda). *E-Journal Ilmu Pemerintahan*, 6(4), 1989–2002.
- Kadarisman, M., Suharto, Y., & Majid, A. (2016). Formulasi Kebijakan Sistem Transportasi Laut Policy Formulation of Sea Transportation System. *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JMTranslog)*, 03(2), 59–78.
- Kadarisman, M., Yuliantini, & Abdul Majid, S. (2016). Formulasi Kebijakan Sistem Transportasi Laut [Policy Formulation of Sea Transportation System]. *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JMTranslog)*, 3(2), ISSN 2355-4721.
- Manurung, M. (2019). Kebijakan dan Strategi pengembangan Transportasi Laut di Indonesia, 1–21.
- Mardiani, Anwar, C., & Sultan, M. A. (2013). Model Probabilitas Pemilihan Moda Kapal Ferry Dan Speed Boat Rute Ternate-Tidore. *SIPILsains Fakultas Teknik Universitas Khairun*, 3(6), 33–40.
- Maslina dan Fauzan, M. (2016). Analisa Biaya Operasional Kapal Kotok Terhadap Keselamatan Transportasi Air Pada Pelabuhan Penyeberangan Balikpapan- Penajam. *Transukma*, 02(01), 84–95.
- Meutia, I. F. (2017). *Analisis Kebijakan Publik. Analisis Kebijakan Publik*.
- Miles, M. ., Huberman, & Saldana. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook. Edition 3, Terjemah Tjetjep Rohidin Rohidi, UI-Press, (USA: Sage Publication, 2014), Hlm. 10*.
- Mustari, N. (2015). Pemahaman Kebijakan Publik(Formulasi,Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik). *Kebijakan Publik Deliberatif*, 1, 286.
- Nampira, A. R., Jainuri, & Yumitro, G. (2022). Kebijakan Pemerintah dalam Pembangunan Transportasi di Daerah Perbatasan (Studi Tentang Pembangunan Dan Pengoperasian Pelabuhan Di Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor - NTT). Retrieved from [https://pemerintahan.umm.ac.id/files/file/Naskah Publikasi Arman Rahman Nampira\(1\).pdf](https://pemerintahan.umm.ac.id/files/file/Naskah_Publikasi_Arman_Rahman_Nampira(1).pdf)
- Nurani, D. (2009). Analisis Implementasi Program Bantuan Operasional (BOS) di SDN Jakarta Selatan.
- Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 20 tahun 2015. (2015). Standar Keselamatan Pelayaran.
- Paramita, R. (2024). "Reviewing the Implementation of Public Service Obligation Policies in the Transportation Sector." *Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara*, 8(1), 52-70. Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Keahlian Setjen DPR RI.

- p-ISSN: 2541-5557, e-ISSN: 2985-8879.
- Puteri, R. (2020). *Mewujudkan Transportasi Ideal di Ibu Kota Negara*. Retrieved from <https://www.kompas.id/baca/riset/2020/03/26/mewujudkan-transportasi-ideal-di-ikn>
- Ramdhani. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>
- Rodiyah, I., Choiriyah, I. U., & Sukmana, H. (2022). *Buku Ajar Kebijakan Publik*. Umsida Press. Retrieved from <https://press.umsida.ac.id/index.php/umsidapress/article/view/1308>
- Rusdi, P. (2007). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Ar-Rijal Institute. Yogyakarta.
- Samir, P. (2019). *Kapal Klotok dan Speedboat Jadi Andalan Transporasi, Berharap Jembatan Tol Segera Terwujud*. Retrieved from <https://kaltim.tribunnews.com/2019/08/14/kapal-klotok-dan-speed-boat-jadi-andalan-transporasi-berharap-jembatan-tol-segera-terwujud?page=2>
- Simatupang, P. (1992). Analisis kebijakan : konsep dasar dan prosedur pelaksanaan, 6(3), 1–23.
- Stellamaris, Y. (2017). Analisis Bentuk Mode Transportasi Sungai Di Banjarmasin. *Jurnal Teknologi Berkelanjutan (Sustainable Technology Journal)*, 06(01), 47–56.
- Suandi, I. N., Hermansyah, Y., Siti Waliah, Y., Sisca Noprilia, A. M., Andriyani, D., Purwanti, U., ... Abdul Rauf, F. (2022). *Kebijakan Publik*. Retrieved from <https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/357758-kebijakan-publik-16899e7d.pdf>
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Keduapulu). Bandung: Alfabeta.
- Wicaksana, A., & Rachman, T. (2018). Transportasi Laut di Indonesia dan Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Transportasi Laut. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(1), 10–27. Retrieved from <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Williams, M. (1971). *Social Policy Research And Analysis - The Experience In The Federal Social Agencies*. New York: USA. Retrieved from <https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/social-policy-research-and-analysis-experience-federal-social>
- Wirati, N. K., Antari, G. A. A., & Rahajeng, I. M. (2021). Gambaran Perilaku Keselamatan Penyeberangan Yang Dilakukan Oleh Penyedia Jasa Speed Boat Di Sanur. *Coping: Community of Publishing in Nursing*, 9(3), 332. <https://doi.org/10.24843/coping.2021.v09.i03.p12>

**L
A
M
P
I
R
A
N**

Lampiran: Pertanyaan Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Nama Informan : Andy Sunra Satriadi Sumaryo
 Jabatan/pekerjaan : Kepala Bidang Prasarana Dinas Perhubungan
 Kabupaten Penajam Paser Utara
 Tanggal wawancara :

1. Regulasi dan Izin Operasional:

- 1) Bagaimana pemerintah setempat mengatur izin operasional untuk moda transportasi speed dan klotok di rute Penajam–Balikpapan? Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 1 angka 19, Penjelasan Pasal 96 dan Penjelasan Pasal 97, Pelabuhan speed dan Klotok termasuk dalam kriteria Pelabuhan Pengumpan Lokal yang izin operasional diberikan sesuai kewenangan kepada Bupati/Walikota.

Hingga saat ini, izin operasional belum diberikan karena :

- Belum terpenuhi sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran pasal 96 dan pasal 97, dimana ketentuan teknis meliputi DLKr (Daerah Lingkungan Kerja), DLKp (Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan) dan RIP (Rencana Induk Pelabuhan) belum terpenuhi.
- Lahan eksisting Dermaga Speed dan Klotok masih merupakan lahan private / milik Masyarakat sehingga dibutuhkan usaha ekstra bahwa untuk penetapan Pelabuhan Pengumpan Lokal status kepemilikan lahan merupakan milik Pemerintah.

- 2) Apakah ada persyaratan khusus atau regulasi yang harus dipatuhi oleh operator moda transportasi ini ?

Sesuai Maklumat Pelayaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor 526/Phb/92 Tanggl 1 Agustus 1992 yang diatur Kembali dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan dan Pelatihan Ujian Sertifikasi Pelaut Kapal Penangkap Ikan yang didalam Pasal 26 memuat tentang Surat Keterangan Kecakapan Pelaut

2. Infrastruktur dan Fasilitas:

- 1) Bagaimana kondisi infrastruktur untuk moda transportasi speed di rute ini? Apakah ada rencana perbaikan atau pengembangan lebih lanjut?
 - Kondisi eksisting Dermaga Speed hanya memiliki Jembatan Penyeberangan sepanjang 78 m'

- Dialokasikan anggaran sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima belas milyar rupiah) untuk Revitalisasi Dermaga Speed dan Klotok Tahun Anggaran 2024.
- 2) Apakah fasilitas pelabuhan atau dermaga untuk klotok sudah memadai, dan apakah ada upaya untuk meningkatkannya?
 - Belum memadai
 - Dengan alokasi anggaran Rp. 15.000.000.000,- (Lima belas milyar rupiah) untuk Revitalisasi Dermaga Speed dan Klotok Tahun Anggaran 2024 diharapkan memenuhi kriteria persyaratan teknis sebuah Pelabuhan Pengumpan Lokal

3. Keamanan dan Keselamatan:

- 1) Bagaimana pemerintah setempat memastikan keamanan dan keselamatan penumpang dan kru moda transportasi speed dan klotok?
 - Kondisi eksisting Pemerintah Kabupaten belum maksimal dalam melakukan monitoring terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran diakibatkan status Pelabuhan yang belum memiliki status jelas operasional dari Kementerian Perhubungan.
 - Fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran sesuai Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, dilaksanakan oleh Syahbandar yaitu Kepala KSOP Kelas I Balikpapan.
 - Akibat kondisi belum adanya penetapan sebagai Pelabuhan Pengumpan Lokal sehingga Pemerintah dan Pemerintah Daerah kesulitan dalam melakukan penataan secara aturan.
- 2) Apakah ada aturan kecepatan tertentu yang harus diikuti oleh moda transportasi speed?
 - Dengan SKK 60 Mil, maka kemampuan daya dorong speed dan klotok maksimal dengan kemampuan mesin 40 PK.

4. Pengelolaan Lingkungan:

- 1) Bagaimana pemerintah setempat menangani isu-isu lingkungan terkait dengan moda transportasi klotok, terutama mengingat perjalanan di perairan?
 - Hal ini sangat menjadi perhatian terlebih secara aturan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 sangat jelas mengatur tentang lingkungan, namun dengan kendala Dermaga Speed dan Klotok yang belum memiliki status sebagai Pelabuhan Pengumpan Lokal maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah kesulitan dalam pengarusutamaan lingkungan.
- 2) Apakah ada inisiatif untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar atau membatasi dampak lingkungan moda transportasi speed?

- Dampak emisi gas buang dari Klotok berbahan bakar solar dalam kategori cukup rendah, dengan asumsi konsumsi BBM Solar untuk jarak 10 Mil Laut membutuhkan Solar sebanyak 6 liter.
- Dampak emisi gas buang dari Speed dalam kategori cukup rendah dengan konsumsi BBM Pertalite bercampur oli, untuk bahan bakar Speed dengan jarak 10 Mil Laut membutuhkan BBM sebanyak 5 Liter.

5. Koordinasi antara Pemerintah Lokal:

- 1) Bagaimana koordinasi antara pemerintah daerah Penajam Paser Utara dan Balikpapan dalam mengatur dan memantau moda transportasi ini?
Cukup baik terlebih dengan KSOP Kelas I Balikpapan Hal ini ditandai dengan seringnya rapat internal dengan KSOP Kelas I Balikpapan terkait fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran.
- 2) Apakah ada inisiatif kolaboratif untuk meningkatkan konektivitas dan efisiensi perjalanan?
Untuk saat ini belum ada, Pemda Kabupaten Penajam Paser Utara di tahun 2024 konsentrasi penuh atas pemenuhan persyaratan teknis dan operasional dermaga speed dan klotok untuk menjadi Pelabuhan resmi yaitu Pelabuhan Pengumpan Lokal.

6. Penggunaan Teknologi:

- 1) Apakah ada penggunaan teknologi tertentu dalam mengelola dan memantau operasional moda transportasi speed dan klotok di rute ini?
 - Dengan alokasi anggaran 2024, pengelolaan akan dilaksanakan secara akuntabilitas, professional dan terukur dengan pelibatan swasta yang memiliki ijin operasional Badan Usaha Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal.
- 2) Bagaimana pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan keselamatan perjalanan?
Dengan alokasi anggaran 2024, pengelolaan akan dilaksanakan secara akuntabilitas, professional dan terukur dengan pelibatan swasta yang memiliki ijin operasional Badan Usaha Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal sehingga penggunaan IT menjadi keniscayaan dan kebutuhan mendasar.

7. Rencana Pengembangan Masa Depan:

- 1) Apakah ada rencana pengembangan atau perubahan dalam kebijakan yang akan memengaruhi moda transportasi speed dan klotok di Penajam–Balikpapan?
Pelibatan swasta yang memiliki ijin operasional Badan Usaha Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal sehingga pengelolaan Pelabuhan Pengumpan Lokal menjadi fungsi kepelabuhanan yang tepat dan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Bagaimana pemerintah melihat peran moda transportasi ini dalam pengembangan ekonomi dan pariwisata daerah?
Dengan adopsi konsep model Kapal Klotok, bentuk bangunan menjadi daya tarik wisata lokal yang saat ini Dermaga Speed dan klotok menjadi Titik Nol Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pak Kahar Mashud (Camat Penajam)

2. 1) masih membutuhkan penataan ke arah lebih baik
2) Belum, masih dalam Tahap Penataan
3. 1) Dinas Terkait sedang membentuk Jabatannya,
Monitoring Safety Briefing. / Keselamatan
2) Belum Ada, masalah kecepatan Sany operator
menyebabkan di lapangan
4. 1) Dengan membentuk di Ahli Kepada Operator
baik itu keselamatan maupun Tata Tertib yang
gunakan Akibat perairan maupun penggunaan
ruang di atasnya & penerapan zona Langit
2) Ada, termasuk prosedur pembelian BKR untuk
mode Speed Boat.
5. 1) Koordinasi di laksanakan selama intens yang
di kolaborasi dengan kearifan lokal.
2) Ada, termasuk mengatur jadwal Antrian
6. 1). Belum, masih menggunakan cara Manual
2)
7. 1) Ada, masih dalam Tahap pembaharuan baik
dalam pembaharuan ATKW maupun dalam
Tahap Tata Kota
2) melihat dalam perpelelitan peluang peningkatan
ekonomi dan sektor pariwisata sangat ke-
lanjutan sehingga perlu pendalaman Tata ruang
yang detail sebagai instrumen Aktes pintu
masuk ke PPU

Lampiran: Pertanyaan wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Nama Informan : AMIRJODDIN
 Jabatan/pekerjaan : THL
 Tanggal wawancara :

1. **Regulasi dan Izin Operasional:**

- 1) Bagaimana pemerintah setempat mengatur izin operasional untuk moda transportasi speed dan klotok di rute Penajam-Balikpapan? *tidak tau*
- 2) Apakah ada persyaratan khusus atau regulasi yang harus dipatuhi oleh operator moda transportasi ini? *tidak tau*

2. **Infrastruktur dan Fasilitas:**

- 1) Bagaimana kondisi infrastruktur untuk moda transportasi speed di rute ini? *kurang bagus*
Apakah ada rencana perbaikan atau pengembangan lebih lanjut? *tidak tau*
- 2) Apakah fasilitas pelabuhan atau dermaga untuk klotok sudah memadai, dan apakah ada upaya untuk meningkatkannya? *tidak memadai*

3. **Keamanan dan Keselamatan:**

- 1) Bagaimana pemerintah setempat memastikan keamanan dan keselamatan penumpang dan kru moda transportasi speed dan klotok? *tidak ada*
- 2) Apakah ada aturan kecepatan tertentu yang harus diikuti oleh moda transportasi speed? *tidak ada*

4. **Pengelolaan Lingkungan:**

- 1) Bagaimana pemerintah setempat menangani isu-isu lingkungan terkait dengan moda transportasi klotok, terutama mengingat perjalanan di perairan? *tidak tau*
- 2) Apakah ada inisiatif untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar atau membatasi dampak lingkungan moda transportasi speed? *tidak tau*

5. **Koordinasi antara Pemerintah Lokal:**

- 1) Bagaimana koordinasi antara pemerintah daerah Penajam Paser Utara dan Balikpapan dalam mengatur dan memantau moda transportasi ini? *tidak tau*
- 2) Apakah ada inisiatif kolaboratif untuk meningkatkan konektivitas dan efisiensi perjalanan? *tidak tau*

6. **Penggunaan Teknologi:**

- 1) Apakah ada penggunaan teknologi tertentu dalam mengelola dan memantau operasional moda transportasi speed dan klotok di rute ini? *tidak ada*
- 2) Bagaimana pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan keselamatan perjalanan? *tidak tau*

7. **Rencana Pengembangan Masa Depan:**

- 1) Apakah ada rencana pengembangan atau perubahan dalam kebijakan yang akan memengaruhi moda transportasi speed dan klotok di Penajam-Balikpapan? *tidak ada*
- 2) Bagaimana pemerintah melihat peran moda transportasi ini dalam pengembangan ekonomi dan pariwisata daerah? *tidak tau*

PEDOMAN WAWANCARA

Nama Informan : AJ KURI
 Jabatan/pekerjaan : Staff Kelurahan Penajam
 Tanggal wawancara : 30 NOVEMBER 2023

1. Regulasi dan Izin Operasional:

- 1) Bagaimana pemerintah setempat mengatur izin operasional untuk moda transportasi speed dan klotok di rute Penajam-Balikpapan? Tidak Tahu
- 2) Apakah ada persyaratan khusus atau regulasi yang harus dipatuhi oleh operator moda transportasi ini? Tidak Tahu

2. Infrastruktur dan Fasilitas:

- 1) Bagaimana kondisi infrastruktur untuk moda transportasi speed di rute ini? Umbaran
 tetapi secara pribadi saya tidak terlalu tau soal persyaratan izin operasional untuk moda tsb, selain itu saya ada
- 2) Apakah fasilitas pelabuhan atau dermaga untuk klotok sudah memadai, dan apakah ada upaya untuk meningkatkannya? Tidak memadai dan blum ada upaya untuk meningkatkannya

3. Keamanan dan Keselamatan:

- 1) Bagaimana pemerintah setempat memastikan keamanan dan keselamatan penumpang dan kru moda transportasi speed dan klotok? Tidak Tahu
- 2) Apakah ada aturan kecepatan tertentu yang harus diikuti oleh moda transportasi speed? Tidak ada

4. Pengelolaan Lingkungan:

- 1) Bagaimana pemerintah setempat menangani isu-isu lingkungan terkait dengan moda transportasi klotok, terutama mengingat perjalanan di perairan? Tidak Tahu
- 2) Apakah ada inisiatif untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar atau membatasi dampak lingkungan moda transportasi speed? Tidak Tahu

5. Koordinasi antara Pemerintah Lokal:

- 1) Bagaimana koordinasi antara pemerintah daerah Penajam Paser Utara dan Balikpapan dalam mengatur dan memantau moda transportasi ini? Baik
- 2) Apakah ada inisiatif kolaboratif untuk meningkatkan konektivitas dan efisiensi perjalanan? ada

6. Penggunaan Teknologi:

- 1) Apakah ada penggunaan teknologi tertentu dalam mengelola dan memantau operasional moda transportasi speed dan klotok di rute ini? Tidak ada klotok
- 2) Bagaimana pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan keselamatan perjalanan? Dapat meningkatkan efisiensi dan keselamatan tapi saya tidak tahu apakah ada teknologi penggunaan teknologi tertentu

7. Rencana Pengembangan Masa Depan:

- 1) Apakah ada rencana pengembangan atau perubahan dalam kebijakan yang akan memengaruhi moda transportasi speed dan klotok di Penajam-Balikpapan? Tidak Tahu
- 2) Bagaimana pemerintah melihat peran moda transportasi ini dalam pengembangan ekonomi dan pariwisata daerah? Baik dan sangat responsif

Lampiran: Pertanyaan Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Nama Informan : *Muli Arzal*
 Jabatan/pekerjaan : *urvan pantiin*
 Tanggal wawancara :

1. Regulasi dan Izin Operasional:

- 1) Bagaimana pemerintah setempat mengatur izin operasional untuk moda transportasi speed dan klotok di rute Penajam-Balikpapan? *di lakukan diins terkait*
- 2) Apakah ada persyaratan khusus atau regulasi yang harus dipatuhi oleh operator moda transportasi ini? *ada, yaitu waktu klotok beroperasi di*

2. Infrastruktur dan Fasilitas: *Watori, sedaplan speed boat tidak.*

- 1) Bagaimana kondisi infrastruktur untuk moda transportasi speed di rute ini? Apakah ada rencana perbaikan atau pengembangan lebih lanjut? *ada*
- 2) Apakah fasilitas pelabuhan atau dermaga untuk klotok sudah memadai, dan apakah ada upaya untuk meningkatkannya? *tidak memadai, hanya*

3. Keamanan dan Keselamatan: *di tingkatkan lagi pengawasan karena di*

- 1) Bagaimana pemerintah setempat memastikan keamanan dan keselamatan penumpang dan kru moda transportasi speed dan klotok? *secara manual atau*
- 2) Apakah ada aturan kecepatan tertentu yang harus diikuti oleh moda transportasi speed? *tidak ada*

4. Pengelolaan Lingkungan:

- 1) Bagaimana pemerintah setempat menangani isu-isu lingkungan terkait dengan moda transportasi klotok, terutama mengingat perjalanan di perairan? *melainkan memproteksi lingkungan laut*
- 2) Apakah ada inisiatif untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar atau membatasi dampak lingkungan moda transportasi speed? *tidak ada*

5. Koordinasi antara Pemerintah Lokal:

- 1) Bagaimana koordinasi antara pemerintah daerah Penajam Paser Utara dan Balikpapan dalam mengatur dan memantau moda transportasi ini? *ada, pada yg*
- 2) Apakah ada inisiatif kolaboratif untuk meningkatkan konektivitas dan efisiensi perjalanan? *ada, dengan transportasi kapal ferry yang*

6. Penggunaan Teknologi: *terlambun keselamatan nya.*

- 1) Apakah ada penggunaan teknologi tertentu dalam mengelola dan memantau operasional moda transportasi speed dan klotok di rute ini? *tidak tahu*
- 2) Bagaimana pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan keselamatan perjalanan? *belum ada, teknologi yg memadai yang*

7. Rencana Pengembangan Masa Depan: *di paku dan transportasi di ppu.*

- 1) Apakah ada rencana pengembangan atau perubahan dalam kebijakan yang akan memengaruhi moda transportasi speed dan klotok di Penajam-Balikpapan? *ada rencana perbaikan pelayanan tersebut*
- 2) Bagaimana pemerintah melihat peran moda transportasi ini dalam pengembangan ekonomi dan pariwisata daerah? *sangat berpotensi*
menjadi salah satu destinasi wisata air yang ada
di ppu, tetapi selama ini belum di kelola dgn
baik oleh pemerintahan ppu.

Lampiran: Pertanyaan Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Nama Informan : Syaifulloh Hasan
 Jabatan/pekerjaan : Staf PPSDA/Honorer
 Tanggal wawancara : 1 Desember 2023

1. **Regulasi dan Izin Operasional:**
 - 1) Bagaimana pemerintah setempat mengatur izin operasional untuk moda transportasi speed dan klotok di rute Penajam-Balikpapan?
 - 2) Apakah ada persyaratan khusus atau regulasi yang harus dipatuhi oleh operator moda transportasi ini?
2. **Infrastruktur dan Fasilitas:**
 - 1) Bagaimana kondisi infrastruktur untuk moda transportasi speed di rute ini?
 - 2) Apakah ada rencana perbaikan atau pengembangan lebih lanjut?
 - 2) Apakah fasilitas pelabuhan atau dermaga untuk klotok sudah memadai, dan apakah ada upaya untuk meningkatkannya?
3. **Keamanan dan Keselamatan:**
 - 1) Bagaimana pemerintah setempat memastikan keamanan dan keselamatan penumpang dan kru moda transportasi speed dan klotok?
 - 2) Apakah ada aturan kecepatan tertentu yang harus diikuti oleh moda transportasi speed?
4. **Pengelolaan Lingkungan:**
 - 1) Bagaimana pemerintah setempat menangani isu-isu lingkungan terkait dengan moda transportasi klotok, terutama mengingat perjalanan di perairan?
 - 2) Apakah ada inisiatif untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar atau membatasi dampak lingkungan moda transportasi speed?
5. **Koordinasi antara Pemerintah Lokal:**
 - 1) Bagaimana koordinasi antara pemerintah daerah Penajam Paser Utara dan Balikpapan dalam mengatur dan memantau moda transportasi ini?
 - 2) Apakah ada inisiatif kolaboratif untuk meningkatkan konektivitas dan efisiensi perjalanan?
6. **Penggunaan Teknologi:**
 - 1) Apakah ada penggunaan teknologi tertentu dalam mengelola dan memantau operasional moda transportasi speed dan klotok di rute ini?
 - 2) Bagaimana pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan keselamatan perjalanan?
7. **Rencana Pengembangan Masa Depan:**
 - 1) Apakah ada rencana pengembangan atau perubahan dalam kebijakan yang akan memengaruhi moda transportasi speed dan klotok di Penajam-Balikpapan?
 - 2) Bagaimana pemerintah melihat peran moda transportasi ini dalam pengembangan ekonomi dan pariwisata daerah?

Seorang Warga Negara Indonesia atau badan usaha,
 2. Pemberian rekomendasi izin pengoperasian kapal untuk penyeberangan dalam kabupaten.

2. Tidak tahu
- 2-1 Jawaban : cukup memadai fasilitasnya dan kemungkinan ada perbaikan dari pemerintah setempat
- 2 cukup memadai dan pasti ada upaya untuk peningkatan
- 3-1 Jawaban : Dengan memberikan bantuan pelampung keselamatan dan safety lainnya serta membekali arahan sesuai dengan standar keselamatan
2. Tidak tahu
- 4-1 Jawaban : pemerintah setempat turun langsung melalui dinas perhubungan untuk mengawasi dan meredam terkait isu-isu lingkungan dengan moda transportasi klotok.
2. Tidak tahu
- 5-1 Jawaban : Tidak tahu
- 2- Tidak tahu
- 6-1 Jawaban : Tidak tahu
- 2 Tidak tahu
- 7-1 Jawaban : Tidak tahu
- 2 Tidak tahu